

**PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI  
KECAMATAN WARA KOTA PALOPO  
TAHUN 2009-2010**

**Analisis Yuridis Menurut Undang-Undang No 1 Tahun  
1974 dan Kompilasi Hukum Islam**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister dalam Bidang Hukum Islam pada  
Program Pascasarjana UIN Alauddin  
Makassar**

**Oleh :**

**Muhammad Nasrullah**

**NIM : 80100206200**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2012**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini benar adalah karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat serta dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palopo, 6 Mei 2011

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
Muhammad Nasrullah

## PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul ***“Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Wara Kota Palopo Tahun 2009-2010 Analisis Yuridis Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”***. Yang disusun oleh Saudara **Muhammad Nasrullah** NIM: 80100206200, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 25 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1433 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

### PROMOTOR:

1. Prof. Dr. H. Moch. Qasim Mathar, M.A. (.....)

### KOPROMOTOR:

1. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag. (.....)

### PENGUJI:

1. Prof. Dr. H. Minhajuddin, M.A. (.....)
2. Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, M.A. (.....)
3. Prof. Dr. H. Moch. Qasim Mathar, M.A. (.....)
4. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag. (.....)

Makassar, Mei 2012

Ketua Program Studi  
Dirasah Islamiyah,

Diketahui oleh:  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Alauddin Makassar,

**Dr. Muljono Damopolii, M.Ag**  
NIP. 19641110 199203 1 005

**Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.**  
NIP. 19540816 198303 1 004

## **PERSETUJUAN PROMOTOR**

Promotor penulisan tesis saudara Muhammad Nasrullah, NIM. 80100206200, Mahasiswa hukum Islam pada Program Pascasarjana (Pps) UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi tesis yang bersangkutan dengan judul: “ Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) “, memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk Seminar Hasil Penelitian.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Promotor I

Promotor II

**Prof. Dr. Moch. Qasim Mathar, M.A    Dr. H. Muammar Bakri, Lc., M.Ag**

Makassar, Februari 2011

**Di ketahui oleh :**

**Ketua Program Studi  
Dirasah Islamiyah**

**Direktur Program Pascasarjana  
UIN Alauddin Makassar**

**Dr. Muljono Domopolii, M.Ag**  
NIP. 19641110 199203 1 005

**Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, MA**  
NIP. 19520811 198203 1 001

## PERSETUJUAN PROMOTOR

Promotor penulisan tesis saudara Muhammad Nasrullah, NIM. 80100206200, Mahasiswa hukum Islam pada Program Pascasarjana (Pps) UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi tesis yang bersangkutan dengan judul: “ Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) “, memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk Ujian Akhir.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Promotor I

Promotor II

**Prof. Dr. Moch. Qasim Mathar, M.A    Dr. H. Muammar Bakri, Lc., M.Ag**

Makassar, Mei 2012

**Di ketahui oleh :**

**Ketua Program Studi  
Dirasah Islamiyah**

**Direktur Program Pascasarjana  
UIN Alauddin Makassar**

**Dr. Muljono Domopolii, M.Ag**  
NIP. 19641110 199203 1 005

**Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, MA**  
NIP. 19520811 198203 1 001

## PENGESAHAN TESIS

N a m a : Muhammad Nasrullah  
Nim : 80100206200  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : ANALISIS HUKUM MENGENAI PERKAWINAN DI  
BAWAH TANGAN DI KECAMATAN WARA KOTA  
PALOPO (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1  
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)

---

### PROMOTOR

Prof. Dr. Moch. Qasim Mathar, M.A (.....)

Dr. H. Muammar Bakri, Lc., M.Ag (.....)

### PENGUJI

Prof. DR. H. Minhajuddin, M.A (.....)

Prof. DR. H. Hasyim Aidid, M.A (.....)

07 Mei 2012 M  
Makassar

15 Jumadil Awal 1433 H

Direktur,  
Program Pascasarjana  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Moh. Nasir Mahmud, MA  
NIP. 19520811 198203 1 001

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### *Transliterasi*

#### *1. Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasikan ke dalam bahasa latin sebagai berikut :

a	:	ا	z	:	ز	q	:	ق
b	:	ب	s	:	س	k	:	ك
t	:	ت	sy	:	ش	L	:	ل
ś	:	ث	ş	:	ص	m	:	م
j	:	ج	d	:	ض	n	:	ن
h	:	ح	ţ	:	ط	h	:	ه
kh	:	خ	z	:	ظ	w	:	و
d	:	د	‘	:	ع	y	:	ي
ž	:	ذ	g	:	غ			
r	:	ر	f	:	ف			

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

#### *2. Vokal dan Diftong*

- a. Vokal atau bunyi (a), (i) dan (u) ditulis dengan ketentuan berikut:

Vokal	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	a	â
<i>Kasrah</i>	I	î
<i>Dammah</i>	u	û

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (*ay*) dan (*aw*) misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول)

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda
4. Kata sandang *al* (*alif lam ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (Al-). Contoh :

Menurut pendapat al-Bukhāriy, hadis ini....

Al-Bukhāriy berpendapat bahwa hadis ini...

5. *Ta marbūtah* (ة) ditransliterasikan dengan huruf *t*. Tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan huruf *h*. contohnya :

*Al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*

6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang sudah menjadi bagian dari penbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas,



misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks, harus ditransliterasi secara utuh.

Misalnya :

*Fī Zilāl al-Qur'ān;*

*Al-Sunnat qabl al-tadwin*

*Al-'ibrat bi 'Umūm al-lafz lā bi khusūs al-sabab*

7. *Lafz al-Jalālah* (الله) yang didahului oleh partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilayh* (frase nomina), maka ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

## **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

1. swt. : Subhanahu wata'ala
2. saw. : Sallallahu alaihi wa sallam
3. a.s. : 'alayhi al-salam
4. H. : Hijriah
5. M. : Masehi
6. SM : Sebelum masehi
7. w. : Wafat
8. QS... (...) : 4 : Qur'an, Surah..., ayat 4

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Rab al-Jalil atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang Perkawinan), dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam sejahtera kepada baginda Rasulullah Muhammad saw., atas jasa dan pengabdianya yang tulus dan ikhlas dalam menyampaikan risalah kebenaran Islam kepada manusia, sehingga manusia mendapat petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk sugesti, motivasi moril, dan materil. Oleh karena itu, penulis berkewajiban untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moch. Qasim Mathar, MA dan Dr. H. Muammar Bakri, Lc., M.Ag. selaku promotor penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis.

2. Prof. Dr. H. Ahmad M Sewang, MA selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, serta Prof. Dr. H. Moch. Qasim Mathar, MA selaku Asdir I dan Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag. selaku Asdir II yang telah banyak memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan, motivasi dan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan kepada segenap pimpinan UIN Alauddin Makassar yang telah menyediakan fasilitas pendidikan.
4. Bapak/ibu dosen Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis, sehingga penulis dapat melalui proses pendidikan dengan baik.
5. Seluruh Karyawan dan Tata Usaha PPs UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu dalam pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.
6. Ibu kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan STAIN Palopo yang memfasilitasi penulis untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
7. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo yang telah memberikan izin serta dorongan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar.
8. Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Penyelenggara Haji Kementerian Agama Kota Palopo yang telah memberikan masukan

serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar.

9. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo yang telah memberikan petunjuk-petunjuknya dalam penyelesaian penelitian yang telah penulis laksanakan di wilayah Kecamatan Wara Kota Palopo.
10. Terkhusus kepada ayahanda tercinta **Nursjam Baso** dan ibunda tersayang **Andi Masrukiyah Saleng**, tiada kata yang patut diucapkan untuk menghantarkan rasa hutang budi dan terima kasih yang tak terhingga atas segala jerih payah, pengorbanan dan doa restu selama membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga jerih payah dan pengorbanan keduanya selalu mendapat rahmat dan imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt.
11. Keluarga dan seluruh handai tolan penulis yang tak bosan-bosannya membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan. Demikian pula kepada seluruh sahabat-sahabat penulis yang senantiasa berdiskusi dan memberikan motivasi.

Akhirul kalam, disadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih terdapat beberapa ketidaksempurnaan sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, sumbang saran dan kritik konstruktif dari semua pihak merupakan penghargaan dan kehormatan bagi penulis. Sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih, semoga semua aktivitas yang

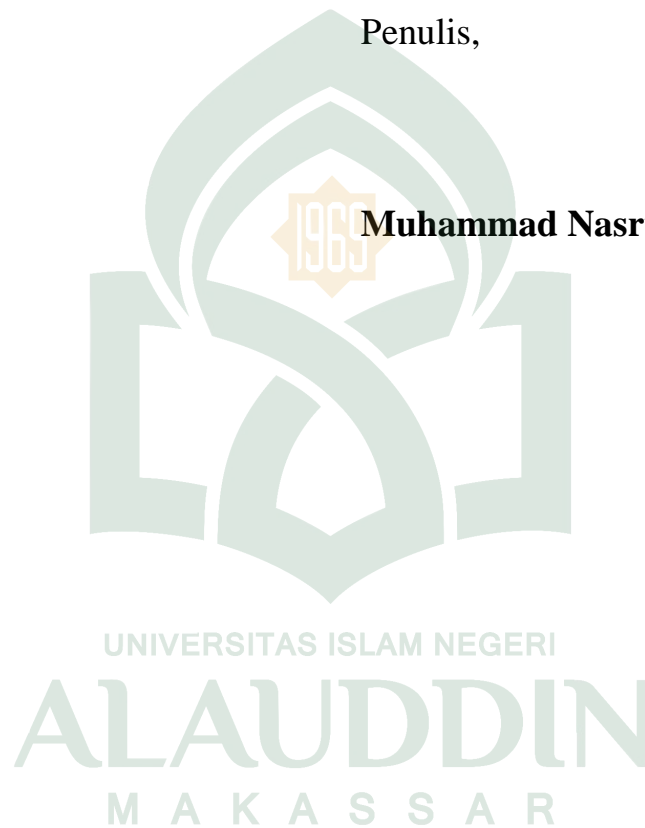
dilakukan bernilai ibadah dan mendapat limpahan pahala di sisi Allah swt., Amin ya rabb al-alamin.

Palopo, 6 Februari 2011

Wassalam,

Penulis,

**Muhammad Nasrullah**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PERSETUJUAN PROMOTOR .....	iii
PENGESAHAN TESIS .....	iv
TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Pengertian Beberapa Istilah .....	10
D. Kerangka Teori .....	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	19
F. Garis Besar Isi Tesis .....	21
 BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	 23
A. Pengertian Perkawinan : Paradigma Dasar .....	23
B. Hukum Dasar Perkawinan .....	37
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	49
 BAB III METODE PENELITIAN .....	 67
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	67
B. Jenis Penelitian .....	70
C. Instrumen Penelitian .....	71
D. Pendekatan Penelitian .....	72

E. Metode Pengumpulan Data .....	73
F. Metode Analisis Data .....	74
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
A. Bentuk dan Motif Peristiwa Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo .....	76
B. Perspektif Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo .....	94
C. Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan .....	104
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Rekomendasi .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>



## ABSTRAK

Nama : Muahmmad Nasrullah  
NIM. : 80100206200  
Judul Tesis : Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi HukumIslam)

---

Tesis ini membahas secara analitis deskriptif kualitatif tentang peristiwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo. Oleh karena itu, permasalahan mendasar yang melatarbelakangi penelitian ini adalah fenomena perkawinan di bawah tangan bukan hanya menjadi persoalan agama, akan tetapi juga merupakan persoalan sosial yang memberikan dampak pada tatanan kehidupan masyarakat.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, sehingga dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dilakukan dengan *field research*, yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumen. Di samping itu, juga dilakukan penelitian pustaka dengan cara mengutip, menyadur, dan mengulas bahan dari buku-buku (*literature*) atau kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sebagai data pendukung, baik dalam bentuk buku, makalah dan artikel-artikel yang dianggap representatif. Selanjutnya diolah dengan menggunakan metode analisis induktif dan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo, mempola dalam berbagai bentuk dan motif. Namun demikian, apapun bentuk dan motif perkawinan di bawah tangan, tetap tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang mempunyai akibat hukum.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu aspek hukum Islam (hukum keluarga) yang banyak dan menarik diperbincangkan. Hal ini disebabkan oleh karena dalam hukum keluarga Islam, masalah perkawinan merupakan masalah yang paling banyak diangkat dan dibahas. Bahkan menurut suatu informasi bahwa 2/3 dari hukum kekeluargaan Islam adalah masalah perkawinan. Dalam kaitan ini J.N.D. Anderson mengatakan bahwa perkawinan banyak dibicarakan karena merupakan inti dari hukum keluarga. Sedangkan hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'at, karena bagian inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama dan masyarakat.<sup>1</sup> Di samping itu, hukum keluarga diakui sebagai landasan utama dalam pembentukan masyarakat yang lebih besar.

Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa hukum yang sakral. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang suci (*miṣaqan ḡalidzan*) yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at. Sakralitas perkawinan tampak pada akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam hal ini, perkawinan secara esensial menghalalkan

---

<sup>1</sup>J.N.D. Anderson, *Islamic Law in Modern World*, alih bahasa oleh Machnun Husain dengan judul : *Hukum Islam di Dunia Modern* (Cet. I; Surabaya : Amar Press, 1991), h. 42

suatu perbuatan yang pada asalnya diharamkan, yakni hubungan seksual. Dengan demikian, perkawinan harus benar-benar memperhatikan dan memenuhi segala aspek yang berkaitan dengan keabsahannya.

Di samping perkawinan merupakan medium legalisasi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, juga merupakan medium untuk menjaga kemurnian dan kebersihan geneologis dari ras manusia.<sup>2</sup> Dengan demikian, perkawinan pada dasarnya merupakan pranata biologis yang berfungsi untuk meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.<sup>3</sup> Selain itu, perkawinan juga dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.<sup>4</sup>

Dalam konteks ini, perkawinan dalam Islam tidak sekedar sebagai hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan mencakup tiga aspek, yaitu; legalitas, sosial dan agama. Dari sisi legalnya, perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah

---

<sup>2</sup>Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008), h. 107

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Cet. II; Bandung: Alumni, 1983), h.221.

<sup>4</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Crt. VII; Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 122.

dibakukan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang dipandang sebagai perkawinan ilegal yang secara hukum dianggap tidak mengakibatkan ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada aspek sosial, perkawinan memberikan penghormatan kepada perempuan karena perempuan yang sudah kawin mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding sebelum kawin. Di samping itu, secara sosial perkawinan merupakan basis terbentuknya masyarakat karena perkawinan merupakan pranata untuk melangsungkan ras manusia.

Sementara itu, dari aspek agama dalam perkawinan tampak pada keharusan memenuhi ketentuan agama. Dalam hal ini, perkawinan dipandang sah apabila tidak bertentangan dengan ajaran agama. Di samping itu, Islam memandang bahwa perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, akan tetapi perkawinan juga dipandang sebagai ibadah. Dengan demikian, dalam Islam institusi perkawinan harus dipertahankan selamanya. Memang ditemukan ketentuan kebolehan perceraian dalam hukum perkawinan Islam, akan tetapi perceraian dipandang sebagai perbuatan yang dibenci. Oleh karena itu, perkawinan kontrak (nikah mut'ah) tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena perkawinan bukan sekedar rekreasi seksual,

---

<sup>5</sup> Asaf A. A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, (t.c. Delhi: Oxford University Press, 1974), h. 88

melainkan sarana untuk melangsungkan kehidupan melalui proses prokreasi.<sup>6</sup>

Di samping itu, sistem perkawinan dalam Islam mempunyai karakter yang unik jika dibandingkan dengan sistem perkawinan lain. Dikatakan demikian karena dalam sistem perkawinan Islam ditemukan adanya penyatuan (baca; integrasi) antara aspek ibadah dan muamalah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai nilai dan kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam. Perkawinan tidak terbatas pada pengertian sebagai kontrak legal, akan tetapi juga dipandang sebagai titik awal pembentukan keluarga dan pada gilirannya menjadi faktor fundamental dalam sebuah bangunan masyarakat. Dengan demikian, dapat dimengerti jika perkawinan senantiasa mendapat porsi yang besar untuk dibicarakan, baik pada tataran agama maupun pada tataran Negara.

Pada tataran agama, perkawinan selalu menghadirkan dimensi religiusnya, khususnya nilai-nilai teologis. Itu artinya bahwa perkawinan merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan ajaran fundamental agama (Islam). Sedangkan pada tataran Negara, perkawinan menjadi bagian integral dari hukum kekeluargaan yang diatur melalui regulasi perundang-undangan. Kehadiran dimensi agama dan Negara dalam

---

<sup>6</sup> Ratno Lukito, *op.cit.* h. 108

sistem perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan di samping merupakan urusan privat (personal) juga termasuk urusan publik.

Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan ini berlaku secara positif dan mengikat bagi warga Negara Indonesia dalam melaksanakan perkawinan. Artinya bahwa setiap peristiwa perkawinan yang dilaksanakan harus mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam kedua peraturan ini.

Suatu perbuatan kawin atau peristiwa nikah dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum (baca; sesuai dengan hukum), apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.<sup>7</sup> Dalam hal ini, ketentuan hukum yang mengatur tentang tatacara perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Perlu ditegaskan bahwa setelah Kompilasi Hukum Islam diterbitkan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, maka setiap peristiwa nikah atau perbuatan kawin bagi umat Islam harus mengacu pada KHI.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 dan merupakan Undang-undang perkawinan nasional. Undang-undang ini, selain

---

<sup>7</sup>A. Gani Abdullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*, dalam Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 23 Thn VI 1995, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam), h. 46

meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional, juga mengandung prinsip-prinsip sebagai landasan hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang ini, dipandang sebagai peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum, yakni mempunyai hak untuk mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

Peraturan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia, memperlihatkan suatu perkembangan dan upaya penyempurnaan. Oleh karena itu, pada tahun 1991 dikelurakan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian dari sejarah hukum perkawinan nasional di Indonesia. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam merupakan respon pemerintah terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa terbitnya Kompilasi Hukum Islam memberikan jawaban dan kepastian hukum bagi bangsa Indonesia (khususnya umat Islam) dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia, sekaligus memberikan jawaban atas permasalahan bahwa hukum perkawinan yang berlaku tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan pada ayat 2 mensyaratkan bahwa tiap

peristiwa nikah atau perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Paling tidak, terdapat dua persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam suatu peristiwa perkawinan yang sah, yaitu:

1. Tidak bertentangan (baca; sesuai) dengan hukum agama atau hukum Islam bagi umat Islam.
2. Harus dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni bagi umat Islam dicatat pada kantor Urusan Agama setempat.

Demikian pula dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan mengenai keabsahan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menguatkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan lebih tegas dinyatakan pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1964 jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954.
3. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan penghulu atau pembantu penghulu tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>9</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Dipahami dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut, dapat dikatakan bahwa idealisasi perkawinan adalah yang mendapat legalitas menurut Undang-undang perkawinan. Sedangkan perkawinan yang dilegalisir oleh Undang-undang yang berlaku adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam). Oleh karena itu, tidak ditemukan pertentangan antara hukum positif dengan hukum Islam tentang pelaksanaan perkawinan. Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya mengacu pada ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, tidak salah jika dikatakan bahwa Undang-undang perkawinan ( UU. No. 1 Thn 1974) adalah hukum perkawinan Islam.

Selain itu, Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan dua peraturan tentang perkawinan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Atas dasar inilah sehingga tidak ditemukan suatu argument, baik secara yuridis maupun teologis untuk tidak tunduk dan taat pada peraturan atau ketentuan perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Mengabaikan Undang-undang perkawinan berarti mengabaikan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Sebaliknya, melaksanakan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia berarti telah melaksanakan hukum agama (Islam).

Namun demikian, dalam kenyataannya masih ditemukan peristiwa nikah atau perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan



hukum positif Indonesia. Peristiwa perkawinan yang menyalahi ketentuan yang berlaku dipandang sebagai perkawinan ilegal atau dalam istilah lain disebut perkawinan di bawah tangan. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa perkawinan sudah sah jika mengacu pada ketentuan fikih klasik. Dalam hal ini, tidak perlu melakukan pencatatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan.

Pada konteks tersebut, perkawinan di bawah tangan (*illegal*) yang hanya mengacu pada ketentuan fikih klasik, juga terjadi atau ditemukan di Kecamatan Wara Kota Palopo. Perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan oleh masyarakat kota Palopo dengan berbagai argumennya, bukan hanya menyisakan problema sosial, akan tetapi lebih dari pada itu juga menyisakan problema yuridis. Dikatakan demikian karena Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, secara tegas menyatakan bahwa perkawinan di bawah tangan tidak termasuk perbuatan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum. Itu artinya bahwa akibat-akibat yang timbul setelah melaksanakan perkawinan di bawah tangan tidak mendapat jaminan dan perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian tersebut, maka masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum terhadap peristiwa

perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo, dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan motif peristiwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo?
2. Bagaimana tinjauan Undang-undang perkawinan terhadap perkawinan di bawah tangan?
3. Bagaimana akibat yang ditimbulkan perkawinan di bawah tangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

Beberapa istilah kunci yang terdapat dalam judul penelitian ini dipandang perlu untuk diberikan pengertian, sehingga terdapat persepsi yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perbedaan-perbedaan paradigma terhadap istilah yang mempunyai beberapa perbedaan pengertian yang dapat mengaburkan hakekat masalah yang dikaji. Adapun istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Hukum. Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab, yakni akar kata *al-hukm* yang berarti mencegah atau menolak. Dari sini terbentuk kata hukum yang berarti mencegah kedhaliman.<sup>10</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa hukum diartikan sebagai

---

<sup>10</sup>Abu Husain Ahmad bin Zakariyah, *al-Islām wa al- Hukm Bilādiy*, (t.c. Mesir: Dār al-Fikr, 1978), h. 9

peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat atau negara. Selain itu, hukum juga diartikan dengan undang-undang atau peraturan yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian hukum menurut istilah diartikan sebagai garis dasar kebijaksanaan atau pusat pengendalian komunikasi individu yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan Trisno Yuwono dan Pius Abdullah mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang dibuat oleh penguasa.<sup>12</sup>

2. Perkawinan di bawah tangan. Istilah perkawinan di bawah tangan pada dasarnya dimaknai sebagai kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum. Oleh karena itu, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>13</sup> Dengan demikian, perkawinan di bawah tangan mencakup semua peristiwa perkawinan yang dilaksanakan di luar dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah kumpulan peraturan atau ketentuan tentang perkawinan dan mengatur pelaksanaan

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 314.

<sup>12</sup>Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, *Kamus Hukum Praktis*, (Cet. I; Surabaya: Arkola, 1994), h. 131.

<sup>13</sup> A. Gani Abdullah, *op.cit.*, h. 47

perkawinan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berlaku secara nasional baik yang beragama Islam maupun non Islam. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pedoman atau aturan tentang tatacara pelaksanaan perkawinan di Indonesia dan sekaligus menjadi acuan bagi para hakim dalam memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan.

4. Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan peraturan-peraturan tentang hukum Islam yang dilegitimasi melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 dan menjadi pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama Indonesia dalam memutuskan perkara.

Dalam konteks tersebut, analisis hukum mengenai perkawinan di bawah tangan adalah kajian mendalam dan sistematis terhadap peristiwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo, dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bentuk dan motif perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo.

- b. Untuk menganalisa implikasi yuridis perkawinan di bawah tangan dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan perkawinan di bawah tangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai gagasan tentang pengembangan dan supremasi hukum perkawinan dalam sistem hukum nasional.
- 2) Sebagai bahan bacaan (literatur) bagi mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 3) Sebagai perbandingan terhadap beberapa informasi tentang status hukum perkawinan di bawah tangan yang meliputi segala aspeknya.
- 4) Menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum bagi masyarakat yang bergelut dalam studi-studi keislaman dan para praktisi hukum.

### b. Kegunaan Praktis

Untuk kegunaan praktis dapat menambah khazanah kepustakaan mengenai hukum Islam serta dapat menjadi sumbangsih pemikiran kepada pemerintah untuk dijadikan acuan dalam mencerdaskan

kehidupan bangsa dan menegaskan formalisasi perkawinan di tengah perubahan sosial.

### **E. Garis Besar Isi Tesis**

Bab pertama yang merupakan bab pendahuluan di bagi atas beberapa sub bahasan yaitu latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, pengertian judul, kerangka teori, tujuan dan kegunaan penelitian dan garis besar isi tesis. Dalam bab ini diuraikan lebih awal keseluruhan faktor atau aspek yang menjadi pendukung utama dari kajian teoritis permasalahan yang dibarengi dengan berbagai permasalahan hukum, selanjutnya menguraikan secara sederhana obyek penelitian.

Pada bab kedua dikemukakan tinjauan pustaka yang meliputi beberapa sub bab, yaitu pengertian perkawinan: paradigma dasar, hukum dasar perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan serta orientasi terhadap aturan perundang-undangan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dasar tentang perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Pada bab ketiga diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi; lokasi penelitian, jenis penelitian, instrumen penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Pada bab keempat merupakan bab pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi; selang pandang Kota Palopo, bentuk-bentuk perkawinan di bawah tangan, perspektif hukum terhadap perkawinan di bawah tangan serta akibat hukum perkawinan di bawah tangan. Hal ini

dimaksudkan untuk menguraikan hasil penelitian yang pada gilirannya menghasilkan suatu simpulan hukum tentang perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo.

Selanjutnya diakhiri dengan bab penutup yang berisi simpulan dan implementasi/ rekomendasi.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perkawinan: Paradigma Dasar

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu ikatan lahir batin (*mītsāqan ghalīdzan*) antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama menurut ketentuan syari'at Islam dalam membangun tatanan keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana untuk melegalisasi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi lebih dari pada itu perkawinan merupakan perwujudan dari perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Di samping perkawinan merupakan cara yang sah (baca; dibenarkan oleh syari'at Islam) untuk melahirkan keturunan sebagai generasi penerus, juga merupakan gerbang pertama untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Secara etimologi, perkawinan berakar dari kata “kawin” yang berarti membentuk atau membangun suatu keluarga dengan lawan jenis. Di samping itu, kawin juga berarti melakukan hubungan seksual atau hubungan kelamin antara pria atau jantan dengan perempuan atau betina.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kata “kawin” dapat digunakan untuk menjelaskan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III. (Cet. I; Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), h. 518.



hubungan biologis antara dua jenis kelamin yang berbeda, khususnya hubungan biologis yang terjadi pada binatang. Namun demikian, kata “kawin” mengalami pengembangan makna ketika diawali dengan awalan “pe” dan diakhiri dengan akhiran “an” menjadi perkawinan. Dalam hal ini, kata “perkawinan” sebagai bentukan dari kata “kawin” mempunyai makna yang berkaitan dengan urusan kegiatan kawin.<sup>2</sup> Dengan demikian, perkawinan berarti meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan kegiatan hubungan biologis antara dua jenis kelamin yang berbeda.

Kata “kawin” sinonim dengan kata “nikah” yang juga mempunyai arti perjanjian atau ikatan dan hubungan seks. Pada dasarnya, kata “nikah” diserap dari bahasa Arab, yaitu berakar dari kata “*nakaha*” yang berarti berhimpun atau bergabung.<sup>3</sup> *Nikāhun* sebagai bentuk masdar dari kata “*nakaha*”, diartikan dengan *al-dhammu wa al-tadakhul*, yakni menindih atau memasukkan. Selain itu, kata “*nikāhun*” juga diartikan dengan *al-dhammu wa al-jamu*, yakni bergesekan atau berkumpul. Oleh karena itu, menurut kebiasaan orang Arab bahwa pergesekan pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanākahat al-asyjār*, artinya rumpun pohon itu sedang kawin. Dikatakan demikian

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (selanjutnya disebut “Wawaan”), (Cet.II; Jakarta: Mizan, 1996), h. 191.

karena tiupan angin menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke rumpun yang lainnya.<sup>4</sup> Dengan demikian, nikah atau kawin dapat diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>5</sup>

Dalam bahasa Arab, term “*nikāh*” mempunyai beberapa makna, yaitu:

1. Nikah berarti *al-wath'u*, yakni hubungan seks. Oleh karena itu, nikah dalam pengertian ini berarti terjadinya hubungan seks atau hubungan biologis antara dua jenis kelamin yang berbeda.
2. Nikah berarti *al-aqdu*, yakni perjanjian atau ikatan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, nikah dalam pengertian ini dimaknai sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk hidup dalam satu ikatan.
3. Nikah berarti *al-jam'u*, yakni berkumpul. Pemaknaan nikah sinonim dengan kata *al-jam'u* karena dalam nikah mengandung arti interaksi dua pelaku atau lebih. Dikatakan demikian karena dalam perkawinan atau nikah tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, melainkan selamanya melibatkan dua pelaku yang berlainan jenis kelamin.

---

<sup>4</sup> Syarifudin Husain, *Perkawinan di Bawah Tangan Ditinjau dari Sudut Perkawinan di Kabupaten Bone*, (Tesis, Tidak Ditebitkan: 2003), h. 28

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *loc.cit.*

<sup>6</sup> Muhammad al-Sharbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj* Juz III (Mesir; Mustafa al-Babbiy al-Halabi wa Awladuh, 19957), h. 123.

4. Nikah berarti *zaujun* atau *tazwijun*, yakni pasangan.<sup>7</sup> Pemaknaan nikah dengan *zaujun* karena dalam kegiatan nikah seseorang memilih dan menetapkan pasangan. Dalam hal ini, perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan dari lawan jenisnya.

Mengacu pada pengertian nikah tersebut, diketahui bahwa sebenarnya akar perbedaannya terletak pada pemaknaan majazi dan pemaknaan hakiki. Arti yang sebenarnya atau makna hakiki dari kata nikah adalah “*al-dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti majaznya atau makna kiasan dari nikah adalah “*al-wath’u*” yang berarti bersetubuh atau aqad untuk mengadakan perjanjian perkataan.<sup>8</sup>

Kendatipun nikah mempunyai makna hakiki dan makna majazi, namun kedua makna ini tidak mengalami pertentangan secara prinsipil. Artinya, baik makna hakiki maupun makna majazi, keduanya menunjuk kepada arti penyatuan dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu ikatan perjanjian. Di samping itu, makna hakiki dan makna majazi nikah keduanya menunjuk kepada arti interaksi biologis antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, nikah dapat diartikan sebagai hubungan seks antara suami isteri dan dapat pula berarti kesepakatan antara seorang pria

---

<sup>7</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Juz III (Cet.II; Mesir: Maktab al-Babiy al-Halabi wa Awladuh, 1971), h. 145.

<sup>8</sup> Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Cet; III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 1

dengan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami isteri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadat kebaktian kepada Allah.<sup>9</sup>

Dalam kebiasaan sehari-hari, penggunaan atau pemakaian makna kiasan lebih banyak daripada penggunaan arti sebenarnya. Namun demikian, fuqaha berbeda pendapat tentang pemakaian arti kiasan tersebut. Oleh Imam Abu Hanifah menggunakan arti setubuh, sedangkan Imam Syafi'i menggunakan arti mengadakan perjanjian perikatan.<sup>10</sup>

Kaitannya dengan hal tersebut, perbedaan persepsi terhadap makna nikah secara etimologi dapat diidentifikasi kepada 3 golongan, yaitu: *pertama*, golongan yang berpendapat bahwa makna istilah nikah secara hakiki adalah *al-wath'u* atau hubungan seks. Sedangkan makna nikah secara majazi adalah *aqad* atau perjanjian. Menurut golongan ini bahwa pemaknaan nikah dalam arti setubuh didasarkan pada pemahaman terhadap firman Allah dalam QS:4:22 yang melarang seorang anak untuk menikahi perempuan yang sudah dinikahi oleh ayahnya. Kata “*nakaha*” dalam ayat وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ harus diartikan dengan *al-wath'u*, yakni hubungan seksual atau hubungan biologis. Dalam hal ini, kata “*nakaha*” tidak tepat jika diartikan dengan *al-aqdu*,

---

<sup>9</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum-Hukum Islam*, (Cet; III, Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 77

<sup>10</sup> Kamal Mukhtar, *op. cit.*, h. 1

yakni akad atau perjanjian.<sup>11</sup> Dikatakan demikian karena perempuan yang dilarang untuk dikawini dalam QS:4:22 adalah perempuan yang sudah dikawini oleh ayah dan ayah telah melakukan hubungan seksual atau hubungan biologis. Ini menunjukkan bahwa makna substansi atau hakikat dari nikah adalah interaksi biologis sebagaimana lazimnya yang terjadi dalam hubungan suami isteri.

Sementara itu, kata “*nikah*” mengandung pengertian *al-aqdu* adalah arti majazi. Pemaknaan ini dipahami dari lafadz “*tankiha*” dalam firman Allah Qs: 2: 230. Kata “*tankiha*” pada ayat فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهَا بَعدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ harus diartikan dengan *al-aqdu*, yakni akad atau perjanjian. Dikatakan demikian karena ayat ini menjelaskan bahwa perempuan yang sudah ditalak tiga tidak boleh dikawini, kecuali jika perempuan itu telah melakukan akad nikah dengan laki-laki lain. Dalam hal ini, kata “*tankiha*” tidak menunjuk kepada arti *al-wath'u* atau hubungan seks karena ada *qarīnah* yang memalingkan maknanya, sehingga harus diartikan secara majazi yaitu *al-aqdu*. Dengan demikian, jika perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya, setelah kawin dengan laki-laki lain berarti boleh dikawini oleh mantan suaminya yang pertama, kendatipun belum melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri.

---

<sup>11</sup> Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansariy al-Qurthubiy, *Al-jami’ al-Ahkam al-Qur’an*, Jilid XII (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), h. 112.

Ini berarti bahwa *aqad* sudah cukup menghalalkan bagi perempuan yang tertalak tiga untuk kawin kembali dengan suaminya yang pertama.<sup>12</sup>

Kaitannya dengan nikah dalam arti akad tersebut, Hazairin tampaknya sependapat dengan ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa substansi perkawinan adalah hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak ada peristiwa nikah atau perkawinan jika tidak terjadi hubungan seksual setelah akad. Argumentasi Hazairin tampaknya didasarkan pada ketentuan tentang iddah bagi isteri yang ditalak sebelum melakukan hubungan seksual. Dalam hal ini, jika tidak terjadi hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak ada iddah bagi wanita yang ditalak.<sup>13</sup> Artinya, isteri yang ditalak sebelum terjadi hubungan seksual, tidak perlu menunggu sampai tiga kali suci atau haid untuk kawin lagi.

*Kedua*, golongan yang berpendapat bahwa makna lafadz “*nikah*” secara hakiki adalah *al-aqdu*, yakni akad atau perjanjian. Artinya, makna dasar dari kata nikah adalah ikatan atau transaksi antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan suami isteri. Sedangkan makna “*nikah*” secara majazi adalah *al-wath'u*, yakni

---

<sup>12</sup>Pemaknaan nikah dalam arti akad sebagaimana dalam arti majazi tersebut, tampaknya mengalami pertentangan jika dikaitkan dengan hadis dari Aisyah yang artinya: “Jika seorang laki-laki menjatuhkan talak tiga pada istrinya, maka tidak halal baginya perempuan itu, sehingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain. Dalam perkawinan itu suami-istri harus merasakan ‘usailah’ temannya”. Maksudnya, suami isteri merasakan orgasme ketika bersetubuh. ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqhu ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz IV (Mesir: al-Maktab al-Tijariyah al-Kubra, 1969), h. 1

<sup>13</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia* (Jakarta: Tinmas, 1961), h. 61.

senggama atau hubungan seksual. Menurut golongan ini bahwa pemaknaan nikah dalam arti akad, didasarkan pada pemahaman terhadap firman Allah QS: 2 : 230 yang berbunyi: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Term “*tankiha*” dalam ayat ini bermakna *al-aqdu* (akad atau perjanjian), bukan “*al-wath’u*” (hubungan seksual atau senggama). Dikatakan demikian karena akad dalam peristiwa nikah merupakan formalitas yang harus dilakukan atau diadakan untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam hal ini, ulama Syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hakikat daripada nikah adalah akad, bukan hubungan seksual.<sup>14</sup>

Al-Zamakhsari tampaknya sejalan dengan pandangan ulama Syafi’iyah dan Malikiyah yang mengartikan lafadz “*nikah*” secara hakiki dengan arti *al-aqdu*. Menurutnya bahwa lafaz “*nikah*” dalam arti *al-aqdu* sebagaimana disebutkan dalam Alquran lebih sesuai dengan hukum syara’. Jika kata “*nikah*” dimaknai secara majazi, yakni hubungan seksual (*al-wath’u*), maka kata yang digunakan adalah kata “*mulāmasah*” atau kata “*mumāsah*” yang artinya menyentuh. Dengan demikian, kata “*nikah*” tidak mungkin dimaknai secara hakiki, yakni “*al-wath’u*” atau hubungan seksual karena menimbulkan rasa tabu untuk

---

<sup>14</sup> ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy, *loc.cit.*

mengucapkannya, dan ini tidak terjadi jika lafadz “*nikah*” diartikan dengan akad (*al-aqdu*).<sup>15</sup>

Pemaknaan nikah dengan akad sebagai makna hakiki, dapat dimaklumi karena tidak ada hubungan seksual yang dibolehkan sebelum terjadinya akad. Oleh karena itu, akad merupakan gerbang atau jalan yang harus dilalui setiap peristiwa hubungan seksual atau peristiwa senggama. Itu artinya bahwa tidak ada hubungan seks tanpa akad dari pihak laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, akad dipandang lebih substansial jika dibandingkan dengan hubungan seksual. Dikatakan demikian karena dalam peristiwa nikah akad harus dilakukan lebih dahulu dari pada hubungan seksual. Seseorang yang sudah nikah belum tentu melakukan hubungan seksual. Di samping itu, keabsahan nikah tidak ditentukan pada hubungan seksual, akan tetapi terletak pada pemenuhan rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana ditetapkan dalam syari’at.

*Ketiga*, golongan yang berpendapat bahwa lafadz “*nikah*” adalah lafadz musytarak yang mempunyai dua arti, “*al-aqdu*” dan “*al-wath’u*”. Oleh karena itu, kata “*nikah*” tidak dapat diartikan sebagai hubungan seksual atau akad saja, akan tetapi nikah harus diartikan dengan hubungan seksual dan akad. Dikatakan demikian karena keduanya merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, kata

---

<sup>15</sup> Muhammad al-Sarbini al-Khatib, *op.cit.*, h. 123.



“*nikah*” mesti dimaknai sebagai kesepakatan yang dinyatakan dengan ucapan melalui *ijāb-qabul* antara wali dengan calon suami yang bertujuan menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.<sup>16</sup>

Tampaknya, golongan ketiga ini tidak memperdebatkan atau mempersoalkan tentang makna hakiki dan makna majazi dari kata “*nikāh*” serta yang mana harus digunakan. Akan tetapi, dalam memaknai kata “*nikāh*” mestinya digunakan makna hakiki dan makna majazi secara simultan. Hal ini penting dan harus dilakukan karena memaknai kata “*nikāh*” dengan perspektif makna hakikinya atau makna majazinya secara terpisah, tidak akan memberikan makna yang sempurna terhadap kata “*nikāh*” itu sendiri. Oleh karena itu, pemaknaan yang utuh dan sempurna terhadap kata “*nikāh*” hanya dapat dipahami dengan menggunakan makna hakiki dan makna majazi secara bersamaan. Dengan demikian, makna “*nikāh*” secara etimologi menurut golongan ketiga adalah hubungan seksual dan akad atau perjanjian.

Secara terminologi, perkawinan atau nikah dapat didefinisikan sebagai suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 1-2. Lihat pula, Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3.

Allah Swt.<sup>17</sup> Sedangkan Sayuti Thalib mendefenisikan perkawinan sebagai suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga.<sup>18</sup>

Dalam mendefenisikan nikah atau perkawinan, para imam mazhab berbeda pendapat, yaitu:

1. Golongan Hanafi mendefinisikan nikah sebagai berikut:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُقْبَدُ مِلْكُ الْمُتَعَةِ قَصْدًا.

Artinya: Nikah adalah akad yang memfaedakan memiliki dan bersenang-senang dengan sengaja.

2. Golongan al-Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai berikut:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكٌ وَطءٌ يَلْفُظُ إِنكاحَ أَوْ تَزْوِيجَ أَوْ مَعْنَاهَا

Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha* dengan lafaz nikah atau yang semakna dengan keduanya.<sup>19</sup>

3. Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet; IV, Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 8.

<sup>18</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, (Cet; V, Jakarta: UI-Pres, 1986), h. 47

<sup>19</sup>Abdurrahman al-Jaziriy, *op. cit.*, h. 2.

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُنْعَةِ التَّلَذُّذِ بِأَدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُؤَجَّبٍ قِيَمَتَهَا بِمِثْلَةٍ.

Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha* bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.<sup>20</sup>

#### 4. Golongan Hanbaliyah mendefinisikan nikah sebagai berikut:

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفْعَةٍ الْإِسْتِغْنَاءِ

Artinya: Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau *tazwij* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>21</sup>

Di Indonesia, perkawinan telah didefenisikan oleh pakar hukum Islam, antara lain:

1. Menurut Mahmud Yunus bahwa perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan calon isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.<sup>22</sup>
2. Menurut Ibrahim Hosen bahwa perkawinan adalah menurut arti dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid II (Kuwait : Dar al-Bayan, 1979), h. 27.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1979), h. 1.

kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah persetubuhan.<sup>23</sup>

3. Menurut Sayuti Thalib bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>24</sup>
4. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsāqaan gholīdan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>25</sup>

Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai perumusan pengertian perkawinan, namun dari beberapa rumusan yang telah

---

<sup>23</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk* (Cet. I; Jakarta: Ihya' Ulumuddin, 1973), h. 65.

<sup>24</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet. I; Jakarta: UI-Press, 1974), h. 47.

<sup>25</sup> Mahkamah Agung RI., *Penemuan Hukum dan Pemecahan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung, t. th.), h. 2.

dikemukakan tersebut ada satu unsur yang merupakan cakupan dari seluruh pendapat, bahwa aqad nikah itu adalah suatu perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Defenisi ini sesuai dengan kandungan makna yang terdapat dalam QS: 4:21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: 21).

Terjemahnya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>26</sup>

Dengan demikian, perkawinan merupakan salah satu sarana atau jalan bagi seorang pria dan seorang wanita untuk saling mengisi dan memberikan kasih sayang antara kedua pihak membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang diridhai oleh Allah Swt. Di samping itu, perkawinan juga merupakan suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan galidzan*) antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Demikian pula perkawinan dipandang sebagai medium untuk memperoleh keturunan yang berdasarkan ketentuan syari'at. Oleh karena itu, perkawinan

---

<sup>26</sup>Departemen Agama RI., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 120

juga merupakan amanah dari Allah yang harus dijalani dan dipertanggung jawabkan. Dikatakan demikian karena akibat dari perkawinan melahirkan hak dan kewajiban dari pihak suami dan isteri yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya.

## **B. Hukum Dasar Perkawinan**

Perkawinan merupakan kebutuhan manusia dalam menyalurkan keinginan biologisnya terhadap lawan jenisnya. Dalam ajaran Islam, perkawinan adalah perbuatan yang disyari'atkan oleh Allah. Ini dimaksudkan agar manusia dalam menyalurkan dan memenuhi kebutuhan biologisnya, dilakukan cara-cara yang benar dan bermartabat. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, hendaknya tidak menyalurkan keinginan biologisnya secara serampangan dan dengan cara yang tidak terpuji. Oleh karena itu, Islam telah menggariskan bahwa cara menyalurkan keinginan biologis manusia yang baik dan bermartabat adalah melalui jalan perkawinan. Dengan demikian, semua bentuk penyaluran keinginan biologis manusia tanpa melalui perkawinan dipandang perbuatan yang haram atau dilarang.

Dalam ajaran Islam, semua perbuatan yang haram atau dilarang pada dasarnya mempunyai akibat negatif bagi manusia. Penyaluran keinginan biologis di luar perkawinan yang sah adalah dosa dan

mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan syari'at. Oleh karena itu, perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan secara jelas dinyatakan oleh Rasulullah bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnahnya. Penegasan Nabi saw yang menyatakan perkawinan sebagai sunnahnya menunjukkan bahwa perkawinan adalah perbuatan yang terpuji dan merupakan ibadah serta mempunyai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Paling tidak, kemaslahatan dari perkawinan adalah menjaga manusia agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Perlu ditegaskan bahwa dalam Islam, zina dipandang perbuatan yang tercela dan cara penyaluran keinginan biologis yang tidak terpuji serta berdampak negatif bagi pelakunya.

Kendatipun perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, akan tetapi tidak berarti berdosa jika tidak dilaksanakan. Dikatakan demikian karena dari sudut pandang hukum, perkawinan tidak diwajibkan kepada semua orang. Melainkan, perkawinan hanya dipandang sebagai perbuatan yang disunnahkan atau dianjurkan bagi orang yang memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan perkawinan. Dalam hal ini, menurut imam Syafi' bahwa perkawinan hukumnya mubah.<sup>27</sup> Namun demikian, hukum kemubahan perkawinan dapat berubah menjadi sunnah jika maksud dan motivasi

---

<sup>27</sup>Syarifuddin Husain, *op.cit.*, h. 20

melaksanakan perkawinan untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa atau zina serta untuk memperoleh keturunan.<sup>28</sup>

Pandangan Syafi'iyah yang menetapkan hukum mubah bagi perkawinan, didasarkan pada pemahamannya terhadap firman Allah dalam QS. al-Nur ayat 32 dan hadits Rasulullah saw dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam QS: 24: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>29</sup>

b. Hadits riwayat Muslim:

<sup>28</sup>Teks pendapat golongan syafi'iyah mengenai hukum asal perkawinan adalah: الْأَصْلُ فِي النِّكَاحِ الْإِبَاحَةُ فَيُبَاحُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَصْدِ التَّلَذُّبِ وَالِاسْتِغْنَاءِ فَإِذَا نَوَى بِهِ الْعِفَّةَ Artinya: Hukum asal nikah adalah *mubah* (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila berniat untuk menghindari diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunat. Abdurrahman Jaziry, *op.cit.*, h. 7

<sup>29</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 549



عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ كَثِيرُ الرَّسُولِ اللَّهُ صَلَعَمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>30</sup>

Artinya: Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup untuk kawin, maka segeralah kawin. Sebab perkawinan itu lebih membatasi penglihatan dan lebih menjaga kehormatan diri dari zina. Dan barang siapa yang belum sanggup kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat memelihara atau mengendalikan nafsu syahwat. (H.R. Bukhari Muslim).

Menurut golongan Syafi'iyah (termasuk jumhur ulama) bahwa kata “*wankihu*” dan “*falyatazawwaj*” dalam ayat dan hadits di atas, tidak menunjukkan hukum wajib, akan tetapi hanya merupakan anjuran atau sunnah. Walaupun kedua kata ini berbentuk amar, akan tetapi bukan berarti amar wajib, melainkan merupakan amar irsyad, yaitu anjuran untuk kemaslahatan dunia.<sup>31</sup> Di samping itu, perintah kawin pada ayat dan hadits tersebut, hanya menunjukkan hukum sunnah karena terdapat qarinah yang memalingkan makna dari wajib menjadi sunnah, yaitu pada lanjutan ayat 3 surah al-Nisa' yang menyuruh memilih antara perkawinan dengan pemeliharaan diri.

Kaitannya dengan hal tersebut, menurut Rahmatunnair bahwa perkawinan merupakan bagian dari muamalah, sedangkan semua

<sup>30</sup>Abi Husaeni Muslim bin Hajjaj al-Nasaeburi al-Qusaeri, *Shahih Muslim*, Jilid II (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 1019

<sup>31</sup> Mahmud Yunus, *op.cit.*, h. 3

perbuatan yang masuk dalam kategori muamalah pada dasarnya dibolehkan. Oleh karena itu, hukum dasar (asal) perkawinan adalah boleh, berbeda dengan shalat yang hukum dasarnya adalah haram. Secara teoritis, segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah, pada dasarnya boleh atau dapat dilakukan, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya atau keharamannya. Sedangkan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah (*mahdah*), pada dasarnya haram atau tidak boleh dilakukan, sepanjang tidak ditemukan dalil yang memerintahkan untuk melaksanakannya.<sup>32</sup>

Memang terdapat sebagian ulama yang menetapkan bahwa hukum dasar (asal) perkawinan adalah wajib (seperti Abu Daud al-dzahiri), akan tetapi alasan yang diajukan mempunyai kelemahan secara epistemologis. Dikatakan demikian karena menetapkan hukum wajib bagi perkawinan hanya didasarkan pada makna leksikal teks. Di samping itu, kurang mempertimbangkan variabel-variabel lain yang menyertai suatu teks. Perlu ditegaskan bahwa kendatipun terdapat teori hukum Islam yang mengatakan bahwa hakikat dari suatu perintah adalah wajib, akan tetapi teori ini kurang tepat diterapkan pada perintah kawin (*wankihu* dan *falyatazawwaj*) sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Nur dan hadits Ibnu Mas'ud. Dikatakan demikian karena terdapat

---

<sup>32</sup> Rahmatunnair, *Eksistensi Maslahat dan Ruang Lingkupnya dalam Hukum Islam*, Makalah, Disampaikan pada Kajian Bulanan Forum Kajian Ilmiah Ulul Albab STAIN Watampone tahun 2008, di Watampone.

variabel lain yang memungkinkan terjadinya perubahan hukum wajib menjadi sunnah. Dalam hal ini, adanya pilihan untuk kawin atau memelihara diri yang terdapat dalam kedua nash tersebut, menunjukkan bahwa perintah kawin tidak berarti wajib, melainkan hanya sunnah.

Selain itu, QS. al-nisa ayat 3 juga dijadikan argumen oleh sebagian ulama yang menetapkan hukum wajib bagi perkawinan.<sup>33</sup> Namun demikian, kata yang mengandung perintah kawin dalam ayat ini (*fankihū*), juga tidak mengandung arti wajib. Di samping itu, ayat ini tidak dapat dijadikan argumen tunggal sehingga menetapkan bahwa hukum asal perkawinan adalah wajib. Dikatakan demikian karena pada dasarnya ayat ini berbicara tentang keharusan berlaku adil jika seseorang berpoligami. Artinya, substansi ayat ini adalah perintah untuk berlaku adil, bukan perintah untuk kawin, termasuk bukan perintah untuk kawin lebih dari satu.

Pada sisi lain, QS. al-nisa ayat 3 juga dijadikan dasar dalam membicarakan asas perkawinan menurut Islam. Mengacu pada ayat ini, ulama mengalami perbedaan penafsiran dalam menetapkan asas perkawinan. Paling tidak terdapat dua golongan, yaitu: *pertama*,

---

<sup>33</sup>QS. al-nisa ayat 3 berbunyi: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (Terjemahnya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya).

golongan yang berpendapat bahwa asas perkawinan menurut Islam adalah poligami. Dikatakan demikian karena Allah mendahulukan menyebut bilangan dua, tiga atau empat dalam ayat yang berbunyi: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, setelah itu baru disebut bilangan satu, yaitu: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.<sup>34</sup> Kemudian, pendapat ini diperkuat dengan fakta sejarah bahwa Rasulullah saw beristeri sampai sembilan orang, bahkan terdapat pendapat yang mengatakan bahwa isteri Nabi saw adalah sebelas orang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asas perkawinan adalah poligami atau lebih dari satu (bukan monogami) berdasarkan makna dan ketentuan yang terdapat dalam ayat ini.

*Kedua*, golongan yang berpendapat bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Argumen yang diajukan oleh golongan ini bahwa dalam ayat terdapat penggalan yang mengatakan: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (terjemahnya: apabila kamu tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja). Kemudian dipertegas lagi dari penggalan ayat: ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (terjemahnya: yang demikian itu lebih baik bagi kamu dari perbuatan aniaya). Di samping itu, terdapat qarinah pada QS. al-nisa ayat 129 yang memalingkan makna asas poligami menjadi asas monogami.<sup>35</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asas perkawinan

---

<sup>34</sup> Abu Qasim Jar Allah Mahmud bin ‘Umar al-Zamakhshariy, *al-Kasysyaf ‘an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil al-Ta’wil*, Juz I (Cet.I; Mesir: Dar al-Fikr, 1977), h. 496-497.

<sup>35</sup> *Ibid.*

dalam Islam adalah asas monogami tidak mutlak. Itu artinya bahwa seorang laki-laki memungkinkan beristeri lebih dari satu (baca; berpoligami) selama sanggup memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam, yakni berlaku adil terhadap isteri-isterinya secara lahir dan bathin.

Mengenai hukum asal perkawinan, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan ayat dan hadits tentang nikah. Di antara mereka, seperti imam al-Dzahiri menetapkan bahwa hukum asal perkawinan adalah wajib. Berbeda dengan ulama pada umumnya, justru menetapkan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah atau boleh. Namun demikian, hukum kebolehan perkawinan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan motivasi (illat) yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini, paling tidak terdapat lima hukum yang memungkinkan bagi perkawinan, yaitu:

1. Mubah. Konsekuensi dari hukum mubah adalah adanya pilihan hukum bagi mukallaf, sehingga seseorang boleh melakukan perkawinan dan boleh tidak melakukannya. Ketentuan kemubahan perkawinan didasarkan pada firman Allah QS. al-nisa ayat 24. yang berbunyi sebagai berikut: Dalam ayat ini, Allah menghalalkan (baca; membolehkan) menikahi perempuan kecuali yang telah nyata-nyata dilarang, seperti larangan yang terdapat pada ayat 22 dan 23 QS. al-Nisa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bagi orang-orang yang

tidak ada halangan untuk kawin dan dorongan untuk kawin belum membahayakan dirinya, ia tidak wajib kawin dan tidak haram pula bila ia tidak kawin. Artinya, belum terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

2. Sunnah. Ketentuan hukum sunnah melaksanakan perkawinan berlaku jika dilihat dari pertumbuhan fisik (jasmani) seseorang telah wajar dan berkeinginan untuk menikah, kemudian dipandang dari segi biaya hidup bagi keluarganya, berkemampuan sekedar hidup sederhana, maka baginya sunnah untuk melakukan perkawinan (nikah). Sedangkan bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk menikah, akan tetapi butuh perlindungan atau nafkah dari seorang suami maka baginya disunnahkan.<sup>36</sup> Dalam artian bahwa seseorang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan zina, maka dianjurkan agar segera melaksanakan perkawinan. Konsekuensi dari hukum sunnah melakukan perkawinan adalah jika dilaksanakan mendapat pahala, akan tetapi jika tidak dilaksanakan tidak ada dosa baginya. Dikatakan demikian karena perkawinan dipandang sebagai jalan yang lebih baik dari hidup membujang.

---

<sup>36</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU. No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet; II, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 22

3. Wajib. Perkawinan hukumnya wajib apabila seseorang dipandang dari segi kehidupan sudah mampu mencukupi kebutuhan keluarga (rumah tangga) dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, jika tidak kawin dikhawatirkan akan terjerumus dari perzinahan, maka wajib hukumnya untuk kawin. Dikatakan demikian karena menghindarkan diri dari perbuatan yang haram (baca; zina) adalah wajib. Sedangkan jalan untuk menghindarkan diri dari perzinahan adalah melaksanakan perkawinan. Teori hukum Islam mengatakan bahwa sesuatu yang dipandang sebagai jalan untuk melaksanakan kewajiban, maka sesuatu itu juga hukumnya wajib. Dalam hal ini, al-Qurtuby berpendapat sebagaimana yang dikutip Sayyid Sabiq bahwa orang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya juga agamanya rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia kawin. Jika nafsunya telah mendesaknya, sedang ia tidak mampu membelanjai isterinya, maka Allah yang akan melapangkan rejekinya.<sup>37</sup>
4. Makruh. Ketentuan hukum makruh bagi seseorang melaksanakan perkawinan berlaku jika secara fisik dipandang sudah wajar untuk kawin, akan tetapi keinginan untuk kawin belum mendesak dan biaya

---

<sup>37</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid VI (Cet; XV, Bandung: PT. Al Maarif), h. 22

untuk kawin belum ada. Di samping itu, juga dikhawatirkan jika melaksanakan perkawinan hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya. Konsekuensi dari hukum makruh adalah jika dilaksanakan tidak ada dosa baginya dan juga tidak mendapat pahala, sebaliknya jika tidak dilaksanakan justru mendapat pahala. Artinya bahwa jika seseorang tidak kawin, maka kemaslahatan yang diperoleh lebih banyak dari pada ia kawin, maka jika ia tidak kawin adalah lebih baik baginya.<sup>38</sup> Secara teoritis, dalam kaidah ushul fikih dikatakan bahwa mengedepankan kemaslahatan diutamakan dari pada menghindari kerusakan atau kemafsadatan. Demikian pula bagi wanita, jika dipandang wajar secara fisik untuk kawin, akan tetapi ia meragukan dirinya untuk dapat mematuhi atau mentaati suami, melaksanakan kewajibannya serta kemampuan mendidik anak-anaknya, maka baginya makruh melakukan perkawinan. Artinya, jika ia tidak melakukan perkawinan, maka hal itu lebih baik dan lebih maslahat baginya.

5. Haram. Perkawinan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menyakiti atau menyiksa perempuan, seperti bermaksud untuk menyiksa atau menyakiti perempuan, maka hukumnya haram. Dikatakan demikian karena salah tujuan hukum Islam adalah memberikan kemaslahatan bagi manusia, maka demikian pula halnya

---

<sup>38</sup> Soemiyati, *op.cit.*, h. 4



dengan perkawinan, juga dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri. Oleh karena itu, jika perkawinan dilaksanakan dengan tujuan memberikan kemafsadatan bagi perempuan, maka perkawinan itu hukumnya haram. Demikian pula perkawinan dipandang haram, jika salah satu di antaranya mengetahui dirinya tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menderita.<sup>39</sup> Termasuk dalam pengertian ini adalah laki-laki yang mengetahui dirinya lemah syahwat atau mengalami kelainan seks, maka haram baginya untuk kawin. Dalam hal ini, menurut al-Qurtuby bahwa jika seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai isterinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak isterinya, maka ia tidak boleh kawin, sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepada pihak perempuan. Begitu pula karena sesuatu hal menjadi lemah syahwat, sehingga tidak mampu menggauli isterinya, maka wajib ia menerangkan dengan terus terang agar perempuan tidak tertipu.<sup>40</sup> Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki, akan tetapi juga berlaku bagi perempuan yang mengetahui dirinya tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya dan memenuhi hak-hak suaminya atau ada kelainan seksual yang menyebabkan tidak bisa melayani

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 21

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 24

kebutuhan biologis suaminya, maka wajib ia menerangkan kepada calon suaminya seluruh kekurangan atau penyakitnya sebelum perkawinan dilaksanakan. Hal ini penting agar menjadi pertimbangan kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi penyesalan setelah kawin dan pada gilirannya menyebabkan terjadinya perceraian.

### **C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Pada dasarnya, semua perintah Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Allah tidak menetapkan hukum-hukumnya secara kebetulan, akan tetapi bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum. Secara umum tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>41</sup> Itu artinya bahwa hukum-hukum yang tertuang dalam syari'at Islam, berorientasi memelihara kemaslahatan para mukallaf dan menolak kemafsadatan, demi terwujudnya kehidupan yang harmonis yang membawa pada kedamaian dan kebahagiaan bagi manusia.<sup>42</sup>

Mashlahah yang menjadi tujuan Tuhan dalam syariat-Nya mutlak diwujudkan, karena keselamatan atau kesejahteraan ukhrawi dan duniawi

---

<sup>41</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 65

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam* (Cet. I; Surabaya : Dunia Ilmu, 1995), h. 56

merupakan kemaslahatan yang bersifat *dharūri*.<sup>43</sup> Pandangan ini sejalan dengan pengertian mashlahah yang diberikan Abd al-Jabbar bahwa mashlahah adalah suatu yang harus diwujudkan manusia guna menghindari mudharat. Jika dikaitkan dengan perbutan Tuhan, maka mashlahah adalah suatu yang mesti dilakukan Tuhan, dan hal ini menunjukkan adanya tujuan Tuhan bagi manusia (*mukallaf*) yang berlaku secara harmonis dengan hukum *taklīf* yang diadakan-Nya.<sup>44</sup> Dalam hal ini, tujuan syariat adalah *lituqam al-hayāt al-dunyā li al-ukhra* (baca; tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat).<sup>45</sup> Dengan demikian, segala hal yang tidak mengandung kemaslahatan dunia dan akhirat atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat, bukan masalah yang menjadi tujuan syariat.<sup>46</sup>

Pada konteks ini, masalah sebagai tujuan syari'at yang diwujudkan manusia untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian, manusia tidak boleh menuruti selera nafsunya, tetapi harus berdasar pada syari'at Tuhan. Hal ini

---

<sup>43</sup> Harold H Tutis Marylin S. Smith dan Richard T. Nolan , *Living issues in Philosophy*, (New York :D van Nostrand Co., 1979 ) h.378.

<sup>44</sup> Abd al-Jabbar, *Syarh al-Ushul al-Khamsah*, ( Mishr: Maktabat Wahbat, 1965), h.779.

<sup>45</sup> Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), h. 37.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hh. 37 & 172.

disebabkan oleh karena syari'at mengacu kepada kemaslahatan manusia, dengan tiga jenisnya, yakni; *dharuriyah*, *hijāyat*, dan *tahsiniyat*. Oleh karena itu, syari'at diadakan untuk kemaslahatan manusia, maka hendaknya perbuatan manusia mengacu pula kepada syari'at itu.<sup>47</sup>

Perkawinan sebagai syari'at Allah yang diperuntukkan bagi manusia, juga bertujuan untuk memberikan maslahat dan memenuhi kepentingan manusia. Oleh karena itu, perkawinan tidak hampa makna dan tujuan, melainkan sarat dengan makna dan berorientasi untuk mewujudkan kebaikan umat manusia di dunia dan diakhirat. Dalam hal ini, perkawinan dipandang sebagai pranata dalam mewujudkan tujuan syari'at, yaitu memelihara dan mempertahankan keturunan (*muhāfadzah ala al-nasl*). Sebagaimana diketahui bahwa manusia secara fitriyah mempunyai keinginan biologis yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syari'at agar manusia memperoleh kebaikan dari padanya, baik di dunia maupun di akhirat.

Di samping itu, perkawinan juga dipandang sebagai pranata yang mampu menghindarkan manusia dari kemafsadatan, khususnya kemafsadatan akibat penyaluran nafsu biologis yang menyimpang dari ketentuan syari'at. Oleh karena itu, dalam Islam perkawinan sangat dianjurkan, terutama bagi orang yang telah memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa haram

---

<sup>47</sup> Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh* (Makassar : Yayasan al-Ahkam, 2003), h. 51

bagi seseorang menghindari perkawinan sekalipun dengan niat untuk beribadah dan taqarrub kepada Allah. Dikatakan demikian karena pada prinsipnya Islam mencela pembujangan, bahkan dipandang bertentangan dengan fitrah manusia yang mempunyai kecenderungan dan keinginan biologis kepada lawan jenisnya.<sup>48</sup>

Manusia secara kodrati diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan, sedangkan perkawinan dipandang sebagai medium bagi manusia untuk mewujudkan kodratnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perkawinan bertujuan mengantar manusia mencapai tujuan hidup bersama dengan pasangannya secara benar dan bermartabat. Islam menegaskan bahwa manusia tidak dibenarkan menyalurkan kodrat biologisnya dan hidup bersama pasangannya kecuali sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syari'at, yakni perkawinan. Itu artinya bahwa perkawinan berfungsi sebagai wadah untuk menemukan dan menyatukan pasangan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Penegasan Allah bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dinyatakan dalam QS: 36: 36 sebagai berikut:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh

---

<sup>48</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pengantin Islam Adab Meminang dan Walimah Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, (Cet; III, Jakarta: Al Ishlahy Press, 1983) h. 17

bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.<sup>49</sup>

Namun demikian, dalam menemukan pasangan yang telah ditetapkan oleh Allah, harus dilakukan dengan cara-cara yang terhormat. Oleh karena itu, Allah telah mengatur menetapkan aturan-aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang bijak, sehingga manusia tidak boleh bertindak semaunya.

Perkawinan adalah salah satu sunnah para nabi yang harus diikuti jejaknya. Oleh karena itu, Allah dan Rasulnya memberikan petunjuk atau memotivasi agar umatnya melakukan perkawinan, bahkan Islam sangat menekankan dan menggalakkan pernikahan sebagaimana firman Allah dalam QS: 4: 3,

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Terjemahnya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.<sup>50</sup>

Di dalam agama Islam, perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karenanya peraturan-peraturan tentang perkawinan tersebut telah diatur dengan jelas dan terperinci. Hukum perkawinan pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaannya saja, melainkan juga mengatur segala persoalan yang ada hubungannya dengan perkawinan, seperti hak-hak dan kewajiban antara suami dan isteri,

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 710

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 115.

mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dan lain-lainnya. Dengan demikian, perkawinan harus dilihat dari berbagai aspek karena tidak hanya menyangkut aspek biologis, tetapi juga menyangkut aspek sosiologis dan psikologis.

Pentingnya kedudukan perkawinan dalam Islam menunjukkan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang luhur dan mulia. Untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan, maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syari'at, seperti adanya wali, dua orang saksi, mahar dan ijab qabul. Ini berarti bahwa perkawinan memerlukan persiapan lahir dan batin sehingga dapat mencapai tujuan dan menjalankan fungsinya yang luas dalam melangsungkan hidup dan kehidupan manusia. Dalam hal ini, Mahmud Yunus mengemukakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat serta membangun rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>51</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS: 30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

---

<sup>51</sup>H. Mahmud Yunus, *op.cit.*, h. 1

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>52</sup>

Pada dasarnya, tujuan perkawinan adalah menyatukan dua pihak yang berbeda dan menyatukan dua keluarga besar dalam suatu ikatan kekeluargaan atau kekerabatan. Oleh karena itu, kedua belah pihak hendaknya saling membantu, saling menghargai satu sama lain, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan-kekurangannya.<sup>53</sup> Ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah membangun kerja sama, tolong menolong serta bantu membantu dalam memanfaatkan hidup sebagai amanah dari Allah.<sup>54</sup>

Pada konteks ini, tujuan perkawinan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Berbakti kepada Allah. Melaksanakan perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi dan menyalurkan hasrat manusia, akan tetapi juga merupakan perintah dari Allah. Oleh karena itu, melakukan perkawinan berarti melaksanakan salah satu perintah

---

<sup>52</sup>Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 644. Selanjutnya menurut Syekh Ismail Haq bahwa kata "وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ" yang berarti Allah menjadikan di antara kamu suami isteri, dari padanya kamu saling mengenal dan melakukan pertalian yang lebih dekat dan kasih sayang. Kata "مَوَدَّةً" yang berarti saling mencintai, sedangkan kata "وَرَحْمَةً" yang berarti saling menyayangi. Syekh Ismail Hak al-Barusu, *Tafsir Ruhul Bayan* Jilid III (Qadsa Ali, 1137 H), h. 19

<sup>53</sup> A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 207

<sup>54</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992), h. 52



dari Allah dan dipandang sebagai ibadah. Dengan demikian, perkawinan yang akan dilaksanakan harus diawali atau didasari oleh niat yang suci dan luhur agar bernilai ibadah di sisi Allah.

2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan. Salah satu kodrat manusia yang sangat asasi adalah kecenderungan untuk hidup bersama dan berpasang-pasangan. Oleh karena itu, perkawinan merupakan kebutuhan manusia dalam mencapai dan mewujudkan kodratnya yang membutuhkan kehadiran orang lain.
3. Mempertahankan keturunan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita. Pada dasarnya, perkawinan dimaksudkan untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal. Selain itu, perkawinan juga dimaksudkan sebagai wadah untuk memperoleh keturunan yang sah. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu motivasi dasar untuk kawin adalah mendapatkan keturunan sebagai pelanjut estafet di masa-masa yang akan datang. Bahkan, dapat dikatakan bahwa keturunan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. Dikatakan demikian karena ikatan perkawinan kadang-kadang diakhiri dengan perceraian dan salah satu penyebabnya adalah tidak mendapatkan keturunan.

4. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup. Perkawinan sebagai pranata sosial berfungsi sebagai perekat hubungan sosial antara dua rumpun keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, di samping perkawinan bertujuan untuk mendekatkan kekerabatan, juga bertujuan untuk membangun saling pengertian agar dapat menjalani kehidupan dengan damai. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa menurut teori sosial, saling pengertian antara golongan juga terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang timbul akibat perkawinan.<sup>55</sup>

Menurut al-Gazali bahwa tujuan perkawinan meliputi lima aspek, yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah. Anak atau keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua unsur kepentingan, yaitu kepentingan diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Setiap orang melakukan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak. Dalam hal ini, perkawinan adalah satu-satunya jalan penyambung keturunan yang sah dan teratur serta dilegalisasi oleh syari'at. Di samping itu, keturunan yang diperoleh dengan perkawinan dapat menghindarkan dari percampuran keturunan, sehingga asal usul keturunan manusia

---

<sup>55</sup> R. Abdul Djamali, *op. cit.*, h. 79

dapat dipelihara secara sah dan baik. Pada gilirannya, tatanan kehidupan manusia atau sistem kemasyarakatan dapat terpelihara dengan baik.

2. Untuk memenuhi tuntutan tabiat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik, secara biologis daya tarik itu ialah kebirahian atau seksual. Islam mengakui adanya gairah seksual antara wanita dan pria secara timbal balik.
3. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu atau keinginan seksual. Islam mengakui bahwa kebutuhan seksual merupakan salah satu kebutuhan yang paling asasi bagi manusia. Oleh karena itu, kebutuhan seksual harus disalurkan secara benar agar tidak menjurumuskan manusia pada kejahatan dan kerusakan. Tanpa adanya tempat penyaluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksual manusia, maka cenderung mencari jalan yang tidak halal. Terdapat banyak kasus yang menunjukkan bahwa manusia mengalami kehancuran dan kerusakan disebabkan oleh pengaruh seksual yang tidak terkendali. Pada tataran ini, perkawinan

menjadi satu-satunya cara yang bermartabat dalam menyalurkan keinginan seksual kepada lawan jenisnya.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Perkawinan merupakan ikatan yang paling teguh dan kokoh karena adanya rasa cinta dan kasih sayang. Rumah tangga yang bahagia dan sejahtera akan terwujud jika didasari oleh cinta dan kasih sayang. Mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menjadi tujuan asasi dalam perkawinan. Dikatakan demikian kemudian dari rumah tangga akan lahir keturunan sebagai rumpun keluarga. Sedangkan rumpun keluarga merupakan basis dari kehidupan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, jika bangunan kehidupan dalam rumah tangga berlangsung dengan baik, maka akan berimplikasi pada kehidupan masyarakat yang baik pula.
5. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Akibat dari perkawinan adalah melahirkan hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga adalah memberikan nafkah yang halal kepada isteri atau keluarganya. Oleh karena itu, suami sebagai kepala keluarga harus mandiri dan kreatif dalam mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya, isteri juga berusaha

memikirkan cara mengatur kehidupan dalam berumah tangga agar berjalan dengan baik.<sup>56</sup>

Perkawinan sebagai suatu perbuatan yang bertujuan luhur dan disukai oleh Allah, mempunyai manfaat yang besar, baik bagi orang yang kawin maupun keluarga kedua belah pihak. Selain itu, perkawinan juga mempunyai makna penting bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Paling tidak, terdapat beberapa alasan yang menunjukkan makna penting perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan yang sah menjadi medium bagi terlaksananya pergaulan hidup manusia, baik secara individual maupun secara kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal. Dalam hal ini, perkawinan juga menempati posisi yang penting dalam mengantarkan manusia mewujudkan kehidupan dan pergaulan yang diridhai oleh Allah. Hidup dengan bermartabat merupakan salah satu tujuan hakiki manusia, sehingga segala sesuatu yang dapat mengantarkan manusia untuk mewujudkan kehidupan bermartabat, juga dipandang penting. Dengan demikian, perkawinan sebagai sarana perwujudan kehidupan manusia yang bermartabat harus ditempatkan dan dipandang sebagai sesuatu yang hakiki pula. Itu artinya bahwa pentingnya perkawinan sama pentingnya dengan tujuan hidup manusia.

---

<sup>56</sup> Ny. Soemiyati, *op. cit.*, h. 12

2. Dengan melakukan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami isteri.
3. Melalui perkawinan yang sah, diharapkan dapat memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
4. Dengan terjadinya perkawinan maka timbul sebuah keluarga yang merupakan inti daripada hidup bermasyarakat, pada gilirannya diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
5. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Alqur'an dan hadits merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan mempunyai dua dimensi yang tak terpisahkan, yaitu dimensi spritual dan dimensi sosial-psikologis.<sup>57</sup> Pada dimensi spritual, perkawinan merupakan ibadah jika dilaksanakan dengan niat yang baik. Sedangkan pada dimensi sosial, perkawinan merupakan wadah

---

<sup>57</sup>Ny. Soemiyati, *op.cit.*, h.4

penyaluran keinginan biologis dan melanjutkan dinamisasi kehidupan melalui perolehan keturunan yang sah.

Dalam konteks tersebut, hikmah perkawinan dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

1. Menjamin kelestarian hidup manusia

Ditetapkannya perkawinan sebagai salah satu yang disyari'atkan dalam Islam, manusia dapat menurunkan generasi penerusnya dan pada gilirannya dapat melestarikan kelangsungan hidup. Kestarian dan kelangsungan hidup manusia sangat diperlukan karena merupakan bagian dari tugas dan fungsinya sebagai khalifah di bumi.<sup>58</sup> Salah satu fungsi dan tugas kekhalifahan yang diemban oleh manusia adalah mempertahankan dan menata kehidupan dunia dengan baik. Hal ini akan terwujud jika manusia melestarikan kehidupannya dengan memperoleh keturunan atau anak secara sah.

Melestarikan kehidupan merupakan perintah Allah dan menjadi salah satu tujuan syari'at. Dikatakan demikian karena dalam kehidupan sangat dihargai dan dihormati. Oleh karena itu, pembunuhan termasuk perbuatan yang dangat dilarang dan dikategorikan sebagai dosa besar. Bahkan, memperoleh keturunan

---

<sup>58</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Adan al-Khitbah Wa Az-Zifaat Wa Haququ az-Zawjain*, terjemah Abu Ahmed Al-Wakidy, Judul *Tata Cara Meminang Dalam Islam* (t. tp., Pustaka Mantiq, 1992), h. 16.

atau memperbanyak keturunan menjadi sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Penciptaan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, pada dasarnya dimaksudkan agar manusia memperoleh keturunan demi kelestarian kehidupan umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS: 4 : 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

Terjemahnya : Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>59</sup>

## 2. Menjaga masyarakat dari kehancuran budi pekerti

Perkawinan yang disyari'atkan ajaran Islam bertujuan untuk menyalurkan nafsu birahi manusia terhadap lawan jenisnya secara sah dan halal. Jika tidak ada syari'at yang menetapkan mengenai hal ini, manusia cenderung mengumbar nafsu tanpa kendali dan tidak memperdulikan kehalalannya.<sup>60</sup> Di era globalisasi dewasa ini, dekadensi moral sudah menjadi panorama, bahkan cenderung menjadi budaya baru. Salah satu bentuk dari dekadensi moral yang terjadi dewasa ini adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena di satu sisi, peran agama mulai melamah di masyarakat dan di sisi lain, pengaruh budaya yang tidak mendidik

<sup>59</sup>Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 114.

<sup>60</sup> Mahmud Yunus, *iop.cit.*, h. 17.



semakin kuat. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sebagai satu-satunya jalan yang diridhai oleh Allah dalam melakukan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan.

### 3. Suami isteri dapat saling membina kehidupan keluarga

Suami isteri yang berada dalam naungan kehidupan rumah tangga, dapat membina rumah tangga mereka. Anak-anak sebagai buah kasih mereka, dididik dan dibina menuju kehidupan yang penuh harapan. Keharmonisan akan tampak dalam hari-hari mereka, dengan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Sang isteri dengan naluri kewanitaannya, menata rumah, melayani kebutuhan suami dan anak-anak sambil mendidik dan membina dengan belai kasih sayang. Sedangkan sang suami bertanggung jawab atas semua kebutuhan keluarga, mencari nafkah demi menapaki kehidupan rumah tangga. Keduanya terlibat dalam gotong royong menuju hari depan yang penuh kemuliaan dalam naungan kasih sayang ajaran Islam.<sup>61</sup>

### 4. Menjaga masyarakat dari penyakit kotor

Perkawinan akan menyelamatkan masyarakat dari terjangkitnya berbagai penyakit yang diakibatkan karena perzinahan dan pelacuran. Penyakit-penyakit yang mungkin timbul karena pergaulan bebas antara lain: Sifilis, kencing nanah, dan sebagainya. Penyakit-penyakit tersebut timbul karena seringnya mengadakan

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

hubungan badan lawan jenis yang terlarang menurut syari'at Islam. Bagian-bagian tubuh yang diserang penyakit biasanya kulit, alat kelamin, dan menjalar pada bagian-bagian lain.<sup>62</sup> Dengan adanya perkawinan, manusia dapat menjaga kesucian dan kesehatan tubuh, dan masyarakatpun dapat terhindar dari dampak penyakit yang merusak tersebut.

#### 5. Menjamin ketenangan rohani dan perasaan diri

Ketenangan suami isteri dapat terjamin dengan adanya perkawinan, karena satu sama lain saling membutuhkan dan melengkapi. Ketenangan juga menjadi bagian dari kebutuhan manusia, bahkan dapat dikatakan kebutuhan dasar yang harus diwujudkan. Ketentuan-ketentuan syari'at Islam pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan ketenangan kepada manusia dalam melakoni kehidupannya. Oleh karena itu, salah satu karakteristik syari'at Islam adalah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia agar dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang.

Perkawinan sebagai bagian tak terpisahkan dari keseluruhan syari'at Islam, tidak terlepas dari tujuan atau orientasi memberikan ketenangan bagi manusia dalam kehidupan rumah tangga pada khususnya dan dalam kehidupan kemasyarakatan pada umumnya.

---

<sup>62</sup> Mahmud Yunus, *op. cit.*, h. 8.

Kehidupan keluarga yang tenang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi agar semua tugas dan peran masing-masing pihak dalam keluarga dijalankan dengan baik, sehingga akan senantiasa hadir keharmonisan hidup.<sup>63</sup>

#### D. Kajian Pustaka

Islam mensyari'atkan perkawinan sebagai institusi pemeliharaan keturunan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan syari'at (*maqāshid al-syarī'ah*) adalah memelihara keturunan. Oleh karena itu, tidak boleh bahkan haram bagi seorang muslim menghindari perkawinan sekalipun dengan niat untuk beribadah dan *taqarrub* kepada Allah, terutama jika memiliki semua syarat serta sarana perkawinan. Hal ini ditekankan, karena Islam memerangi ajaran kehidupan rahib-rahib (*monasticesm*) dan pembujangan yang tercela, karena hal tersebut bertentangan dengan fitrah manusia dalam berbenturan dengan insting, kecenderungan dan keinginan.<sup>64</sup>

Manusia adalah salah satu makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah, ketimbang dengan makhluk lainnya. Allah telah mengatur menetapkan aturan-aturan tentang perkawinan bagi manusia

---

<sup>63</sup> *ibid.*, h. 7.

<sup>64</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pengantin Islam Adab Meminang dan Walimah Menurut Al Qur'an dan Al Sunnah*, (Cet; III, Jakarta: Al Ishlahy Press, 1983) h. 17

dengan aturan-aturan yang bijak, sehingga manusia tidak boleh bertindak semaunya.

Perkawinan adalah salah satu sunnah para nabi yang harus diikuti jejaknya. Oleh karena itu Allah dan Rasul-Nya memberikan petunjuk atau memotivasi agar umatnya melakukan perkawinan, bahkan Islam sangat menekankan dan menggalakkan pernikahan sebagaimana firman Allah dalam QS: 4: 3,

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Terjemahnya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,  
<sup>65</sup>  
 ...

Di dalam agama Islam, perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karenanya peraturan-peraturan tentang perkawinan tersebut telah diatur dengan jelas dan terperinci. Hukum perkawinan pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaannya saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang ada hubungannya dengan perkawinan. Misalnya: Mengatur hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dan lain-lainnya.

---

<sup>65</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : CV. Jaya Sakti, 1997), h. 115.

Pada konteks ini, urgensi perkawinan bagi manusia, dapat dilihat dari beberapa argument, antara lain:

6. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara hormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain.
7. Dengan melakukan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
8. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
9. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti daripada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

10. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Alqur'an dan sunnah adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.<sup>66</sup>

Perkawinan dalam Islam pada dasarnya merupakan sunnatullah yang berlangsung secara alamiah. Bahkan, dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu fitrah bagi manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan. Dalam QS: 36: 36, Allah menegaskan bahwa segala sesuatu (termasuk manusia) telah diciptakan secara berpasang-pasangan, sebagaimana firmanNya:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.<sup>67</sup>

Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha – meridhai dan dengan dihadiri oleh para saksi dan menyaksikan kalau pasangan laki-laki

---

<sup>66</sup> Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet; IV, Yogyakarta: Liberty, 1999), h.4

<sup>67</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : CV. Jaya Sakti, 1997), h. 710.

dan perempuan saling terikat.<sup>68</sup> Oleh karena itu, dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon suami isteri harus matang jiwa dan raganya secara baik untuk dapat membina rumah tangga sakinah dan mendapatkan keturunan yang baik serta sehat dalam suatu ikatan perkawinan.

Keadaan masyarakat yang semakin modern dan kompleks makin membutuhkan peraturan yang bersifat formal terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum. Masalah ini tentu disebabkan karena situasi kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan berubah-ubah sepanjang kehidupan. Untuk itu dibutuhkan campur tangan aturan-aturan hukum secara menyeluruh, yang diharapkan dapat memberikan pedoman atau jalan dalam berbagai aspek pelaksanaan perkawinan. Hal ini penting karena sering dijumpai dalam masyarakat tentang perkawinan yang bermacam-macam bentuk dan tata cara pelaksanaannya. Banyak ditemukan perkawinan yang terjadi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Sedangkan arti perkawinan sebagaimana yang dikemukakan dalam UU No.I tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri

---

<sup>68</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6 (Cet. I; Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1980), h. 8.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>69</sup>

Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum telah mendapat tempat yang esensial dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, pembinaan kesadaran hukum dalam pelaksanaan perkawinan merupakan suatu keharusan dan kebutuhan. Pembinaan kesadaran hukum perkawinan membutuhkan berbagai upaya terencana dan sistematis dengan memperhatikan efesiensi dan efektifitas. Dengan demikian, pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia dapat didekati dalam dua kategori, yaitu; *pertama*, secara yuridis formal melalui perundang-undangan yang pelaksanaannya dibantu oleh penyelenggara Negara untuk menegakkan supremasi hukum perkawinan. *Kedua*, secara normatif yang pelaksanaannya tergantung pada kualitas Iman dan kesadaran hukum tiap-tiap individu dari masyarakat Islam.<sup>70</sup>

Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang. Oleh karena itu, paling tidak terdapat tiga asas yang harus diperhatikan, yaitu;

---

<sup>69</sup>Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, h.13

<sup>70</sup>Andi Rasdiyanah , *Makalah Problematika dan Kendala yang dihadapi hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke Dalam Hukum Nasional*; Disampaikan pada seminar nasional ntang Kontribusi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional setelah limapuluh Tahun Indonesia Merdeka, dalam rangka Reuni I IKA Syari'ah IAIN Alauddin Makassar (1-2- Maret 1996 ) h. 9



- a. Asas absolut abstrak ialah suatu asas dalam hukum perkawinan dimana jodoh atau pasangan suami isteri sudah ditentukan oleh Allah atas usaha atau permintaan manusia yang bersangkutan.
- b. Asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang.
- c. Asas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan yang menekankan wajib hukumnya dicatatkan.<sup>71</sup>

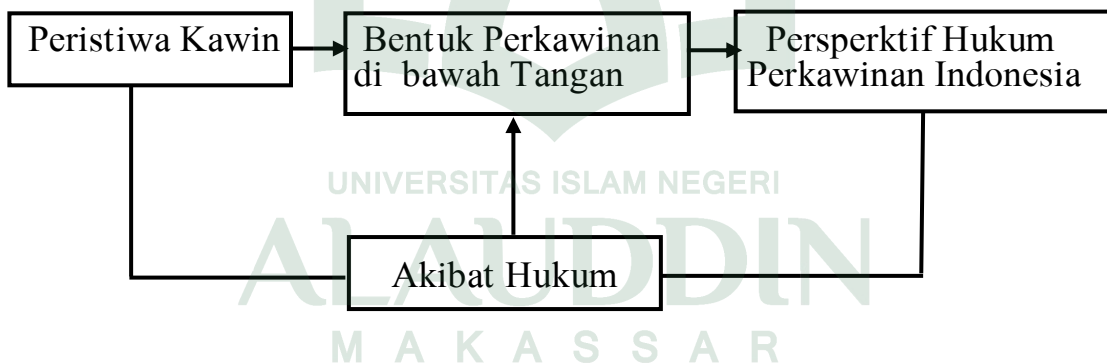
Dengan demikian, kegalitas suatu perkawinan sangat ditentukan pada pemenuhan syarat-syarat keabsahan perkawinan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, standarisasi hukum yang dijadikan tolok ukur dalam menilai absah atau tidaknya suatu perkawinan adalah peraturan atau Undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, kendatipun suatu perkawinan memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, akan jika tidak dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka peristiwa perkawinan itu termasuk illegal atau di bawah tangan. Dikatakan demikian karena menurut perspektif Undang-undang bahwa tidak ada perkawinan yang berlangsung di luar pencatatan. Itu artinya bahwa suatu perkawinan dianggap legal jika dicatat oleh pegawai

---

<sup>71</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1996 ) h. 34

pencatat nikah setelah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama.

Beberapa teori yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya akan dijadikan sebagai kerangka teori dalam penelitian. Oleh karena itu, kerangka teoritis penelitian ini merupakan simpulan pokok dari uraian-uraian teori atau teori-teori, konsep atau konsep-konsep, serta pendapat atau pendapat-pendapat yang menggambarkan alur dan arah pembahasan dalam menjawab permasalahan yang diajukan. Sedangkan secara skematis, penalaran logis dalam bentuk urutan berfikir logis yang digunakan dalam memecahkan masalah yang diajukan, dapat dilihat pada skema sebagai berikut:



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Wara Kota Palopo sebagai Kecamatan yang terpadat atau terbesar jumlah penduduknya. Kota Palopo pada awalnya bernama Kota Administratif Palopo yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu. Pada tahun 2002 Kota Administratif Palopo berubah menjadi Kota Palopo yang dipimpin oleh seorang Wali Kota. Perubahan dari Kota Administratif menjadi Kota Palopo didasarkan pada SK Undang-undang Nomor 11 tahun 2002 dan pada tanggal 10 April 2002 ditetapkan statusnya sebagai Kota Palopo. Pada tanggal 27 Juni 2003 Kota Palopo dipimpin oleh seorang wali Kota berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 53-327 tahun 2003.<sup>1</sup>

Secara geografis, Kota Palopo berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah utara dan Kecamatan Bua di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah barat, berbatasan langsung dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja dan di sebelah timur berbatasan dengan teluk Bone. Kota Palopo merupakan daerah pesisir laut yang diapit oleh tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Toraja dan Kabupaten Luwu Utara. Dengan demikian, Kota Palopo

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Kota Palopo

mempunyai letak yang strategis, baik dari segi lintas transportasi maupun dari segi lintas perekonomian. Dikatakan demikian karena Kota Palopo merupakan jalur darat yang harus dilalui menuju Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur serta Kabupaten Toraja.<sup>2</sup>

Luas wilayah Kota Palopo adalah 257.52 Km<sub>2</sub> yang terdiri dari sembilan (9) Kecamatan, yaitu; Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Barat, Kecamatan Bara, Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Sendana. Menurut data statistik tahun 2009 bahwa jumlah penduduk Kota Palopo yang tersebar pada sembilan Kecamatan adalah 168.464 jiwa. Dari sembilan (9) Kecamatan yang terdapat di Kota Palopo, Kecamatan Wara merupakan Kecamatan yang terbesar jumlah penduduknya, yaitu sebanyak 50.393 jiwa dari berbagai suku dan agama.

Penduduk Kota Palopo termasuk heterogen karena terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Berdasarkan hasil sensus tahun 2009 bahwa suku yang banyak mendiami Kota Palopo terdiri dari suku Luwu sebagai penduduk asli, suku Bugis-Makassar, suku Toraja, suku Jawa, suku Bali, suku Lombok dan suku Mandar. Sedangkan agama yang dianut oleh penduduk Kota Palopo, pada umumnya agama Islam, yakni 144.995 jiwa, selain itu menganut agama Kristen Katolik sebanyak 6917

---

<sup>2</sup> Sumber Data: Kantor Statistik Kota Palopo

jiwa, agama Kristen protestan sebanyak 15. 732 jiwa, agama Hindu sebanyak 400 jiwa dan agama Budha sebanyak 420 jiwa.<sup>3</sup>

Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maka menentukan lokasi penelitian sangat penting dan harus dilakukan lebih awal. Dikatakan demikian karena lokasi penelitian erat kaitannya dengan penentuan teori yang akan menjadi dasar koherensi hasil penelitian. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lokasi penelitian merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Wara sebagai salah satu dari wilayah Kota Palopo. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo menjadi obyek dalam penelitian ini. Penetapan Kecamatan Wara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa argumen, yaitu:

1. Kecamatan Wara terletak di tengah-tengah Kota Palopo dan mempunyai presentasi peristiwa nikah yang tinggi.
2. Kecamatan Wara merupakan Kecamatan yang terpadat penduduknya, sehingga dipandang representatif dari Kota Palopo.
3. Penduduk Kecamatan Wara sangat heterogen, yakni terdiri dari beberapa suku dan agama dengan latar belakang sosial yang berbeda-beda.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

4. Letak Kecamatan Wara cukup strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga sangat membantu peneliti dalam pengumpulan data serta melakukan pengamatan secara langsung.

## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini mengkaji tentang masalah sosial keagamaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yakni masalah perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian lapangan (*field research*) pengkajian dimaksudkan untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>4</sup>

Untuk mendapatkan data penelitian yang relevan, maka penelitian dilakukan dalam bentuk *case study research*, yang dalam realitasnya menggali permasalahan dan keadaan tertentu yang terjadi di masyarakat Kecamatan Wara. Oleh karena itu, data yang terhimpun merupakan suatu keseluruhan yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Kendatipun obyek penelitian ini tergolong kecil, akan tetapi peneliti berusaha untuk menggali berbagai sumber informasi dan sumber

---

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Cet. I; Bandung: Alumni, 1985), h. 27

data yang sebanyak mungkin sehingga kedalaman penelitian tetap terjaga.

Untuk menganalisa data, digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dikatakan demikian karena bukan hanya teorinya yang dikembangkan di lapangan, akan tetapi juga problem atau permasalahan dan pertanyaan boleh jadi mengalami pengembangan, perubahan atau pergeseran aksentuasi. Sedangkan dikatakan sebagai penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan adalah data-data kualitatif dan dianalisis secara kualitatif pula.

### **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan obyek pembahasan. Oleh karena itu, instrumen dalam penelitian meliputi seluruh sarana yang digunakan mengumpulkan data yang diperlukan, seperti tape recorder, camera dan daftar pertanyaan. Di samping itu, instrumen penelitian juga meliputi peneliti dan informan atau sumber informasi.

Menurut Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif pencari tahu alamiah dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada peneliti.<sup>5</sup> Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 19

maka yang menjadi instrumen utama adalah peneliti. Hal ini sejalan dengan kriteria penelitian kualitatif yang menganggap bahwa seorang peneliti sekaligus sebagai instrumen penelitian. Dengan demikian, pemecahan masalah dan intensitas penelitian sangat ditentukan oleh peneliti sebagai instrumen utama. Artinya bahwa kemampuan personal peneliti dalam mengumpulkan data dan menganalisis data, sangat menentukan hasil penelitian.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian merupakan sudut pandang atau paradigma yang dijadikan tolok ukur dalam menilai dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan yuridis, yaitu mendekati masalah-masalah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Pendekatan sosiologis, yaitu mendekati peristiwa perkawinan di bawah tangan dari sudut pandang sosiologi dan mengurai faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhinya. Penerapan pendekatan sosiologi dalam penelitian ini didasarkan pada suatu teori sosial



bahwa perilaku atau tindakan manusia (baca; seseorang) senantiasa korelatif dengan konteks sosial yang mengitarinya.

3. Pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah perkawinan di bawah tangan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis serta pandangan para ulama. Penggunaan pendekatan normatif didasarkan atas suatu pertimbangan bahwa perkawinan secara umum adalah bagian penting dalam hukum kekeluargaan Islam.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Mengacu pada kategori penelitian ini sebagai penelitian kualitatif, maka data-data yang diperlukan adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari nara sumber atau informan melalui wawancara dan hasil studi dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari buku-buku pendukung yang mempunyai relevansi dengan tema kajian yang dibahas, misalnya buku-buku tentang perkawinan, buku-buku tentang hukum kekeluargaan dalam Islam, buku-buku tentang hukum Islam, buku-buku tentang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, buku-buku sosiologi dan pengamatan penulis sendiri, baik yang bersifat kasuistik maupun yang bersifat universal.

Dalam menemukan data yang akurat terhadap masalah yang dikemukakan, maka cara ditempuh adalah *field research* (penelitian lapangan) yakni turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data konkrit mengenai masalah yang akan dibahas dengan menggunakan metode:

- a. Wawancara mendalam mengenai masalah-masalah yang akan dibahas, yaitu para praktisi hukum, pemerintah, tokoh agama dan masyarakat yang dipandang mempunyai kompetensi dalam memberikan informasi tentang peristiwa perkawinan di bawah tangan. dikemukakan adalah dengan menggunakan metode wawancara yang sifatnya terbuka, dalam hal ini memberi waktu yang luang bagi responden untuk mengemukakan pengetahuan mereka tentang peristiwa atau kejadian yang menjadi obyek penelitian ini.
- b. Studi dokumentasi, yaitu meneliti dokumen-dokumen pencatatan nikah yang masih tersimpan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk arsip. Studi dokumentasi dalam penelitian ini tidak hanya berupa studi histories, akan tetapi juga berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena perkawinan di bawah tangan. Oleh karena itu, studi dokumentasi dalam penelitian ini berawal dari menghimpun dokumen, menerangkan, mencatat dan menafsirkannya.

## **F. Metode Analisis Data**

Data yang dipergunakan dalam pembahasan ini bersifat kualitatif, karenanya dalam menganalisis juga digunakan metode analisis kualitatif. Selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung objek pembahasan. Dalam menganalisis data digunakan teknik:

- a. Induktif, menganalisis data dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yakni menganalisis data dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik atau yang lebih khusus.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Bentuk dan Motif Peristiwa Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo**

Perkawinan tidak cukup jika hanya dimaknai sebagai cara yang sah untuk menyalurkan hubungan biologis dan mendapatkan keturunan yang sah, akan tetapi juga harus dimaknai sebagai hubungan hukum antara pihak suami dan pihak isteri berserta keluarganya masing-masing.<sup>1</sup> Dalam hal ini, implikasi dari peristiwa perkawinan adalah terciptanya hubungan kekerabatan yang berimplikasi pada hukum. Dikatakan demikian karena perkawinan menyebabkan adanya hubungan kewarisan antara kedua belah pihak. Di samping itu, perkawinan juga berimplikasi pada terjadinya perubahan hukum karena adanya hubungan kekerabatan, misalnya; akibat dari perkawinan adalah haramnya mengawini atau memadu saudara isteri dan sebaliknya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan melahirkan ikatan kekerabatan antara kedua belah pihak dan ikatan kekerabatan berimplikasi pada terjadinya perubahan hukum. Berlakunya ikatan kekerabatan akibat perkawinan, mengandung makna bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang sakral dan harus dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Cet. 2; Bandung: Alumni, 1983), h. 76

secara benar dan sah. Sedangkan perkawinan yang dipandang benar dan sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ini berarti bahwa perkawinan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku dipandang sebagai perkawinan yang tidak sah (baca; ilegal).

Bagi masyarakat Kecamatan Wara, khususnya suku Luwu dan suku Bugis sebagai penduduk mayoritas beranggapan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang sakral, relegius dan harus dilaksanakan dengan benar. Di samping itu, perkawinan juga dipandang sebagai peristiwa yang menyatukan dua keluarga yang berbeda dalam satu ikatan yang kokoh untuk saling membantu dan bersatu padu membangun tatanan keluarga yang utuh. Oleh karena itu, jika ikatan perkawinan putus akibat perceraian, berakibat pada putusnya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Lebih jauh dikemukakan oleh Zainuddin Samide bahwa bagi masyarakat Luwu dan Bugis perkawinan merupakan pertautan dua rumpun keluarga besar dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Oleh karena itu, perkawinan menyebabkan suatu keluarga terikat oleh suatu ikatan yang disebut *masseddi siri'*, yakni bersatu dalam membangun dan mempertahankan kehormatan keluarga. Atas dasar inilah maka perkawinan harus dilaksanakan dengan mengacu pada

---

<sup>2</sup>Drs. HM. Zainuddin Samide, MA, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tanggal 25 Oktober 2010, di Palopo

norma-norma yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh agama, negara dan adat. Perkawinan yang menyalahi salah satu ketentuan ini dianggap sebagai perkawinan yang kurang sempurna, bahkan kadang-kadang dianggap perkawinan yang tidak normal.<sup>3</sup>

Suatu perkawinan yang melanggar atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku dikategorikan sebagai bentuk perkawinan ilegal. Sedangkan perkawinan ilegal diistilahkan dengan perkawinan di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak prosedural sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Implikasi hukum dari perkawinan di bawah tangan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dipandang sebagai perkawinan yang tidak sah.<sup>4</sup>

Kaitannya dengan perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo, salah seorang tokoh agama, yaitu H. Nurul Haq mengungkapkan bahwa semua peristiwa perkawinan yang dilaksanakan secara tidak prosedural atau tidak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bagi umat Islam, termasuk perkawinan yang tidak sah atau perkawinan di bawah tangan. Sedangkan bagi selain yang beragama Islam harus mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974

---

<sup>3</sup>Drs. HM. Zainuddin, MA, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tanggal 25 Oktober 2010, di Palopo

<sup>4</sup>Drs. H. Nurul Haq, MHI, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2010, di Palopo

tentang Perkawinan. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku bagi umat Islam dan tidak berlaku bagi yang non Islam.<sup>5</sup>

Ungkapan yang senada dikemukakan oleh Hj. Saidah Nasta bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang mengacu pada Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia secara positif. Khusus bagi umat Islam harus mengacu pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa semua peristiwa perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Artinya bahwa salah satu ukuran keabsahan suatu perkawinan yang dilaksanakan adalah jika tidak bertentangan (baca; sesuai) dengan ajaran agama. Bagi umat Islam perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>6</sup>

Lebih jauh Hj. Saidah Nasta mengatakan bahwa walaupun perkawinan mempunyai ketentuan atau peraturan yang jelas dan tegas dalam sistem perundang-undangan, akan tetapi dalam kenyataannya masih ditemukan banyak peristiwa perkawinan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan. Padahal jika dicermati, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak tunduk pada peraturan

---

<sup>5</sup>Drs. H. Nurul Haq, MHI, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2010, di Palopo

<sup>6</sup>Dra. Hj. Saidah Nasta, MPd.I, Kepala Seksi Urais dan Penyelenggara Haji Kementerian Agama Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 25 Oktober 2010, di Palopo

atau ketentuan-ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang, apalagi dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena Undang-undang perkawinan, khususnya Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia bersumber dari atau tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.<sup>7</sup>

Menurut Muh. Neng Talattaf bahwa peristiwa perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo, khususnya di Kelurahan Botting, masih ditemukan. Dalam hal ini, masih ada peristiwa perkawinan yang mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya; perkawinan yang berlangsung tanpa melakukan pencatatan terlebih dahulu. Padahal dalam ketentuan atau Undang-undang perkawinan sangat tegas disebutkan bahwa semua peristiwa perkawinan harus dicatat, minimal 10 hari sebelum pelaksanaan perkawinan.<sup>8</sup>

Selain itu, menurut H. Nasaruddin bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara, khususnya di Kelurahan Lagaligo mempunyai bentuk dan motif yang bervariasi. Sebenarnya, perkawinan di bawah tangan mempunyai arti yang sangat luas karena meliputi semua bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi lazimnya

---

<sup>7</sup>Dra. Hj. Saidah Nasta, MPd.I, Kepala Seksi Urais dan Penyelenggara Haji Kementerian Agama Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 25 Oktober 2010, di Palopo

<sup>8</sup>Drs. H. Muh. Neng Talattaf, Pembantu PPN Kelurahan Botting, *Wawancara*, Tanggal 22 Oktober 2010, di Palopo



perkawinan di bawah tangan hanya ditujukan pada peristiwa perkawinan yang tidak tercatat atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>9</sup>

Bentuk-bentuk perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo, antara lain:

1. Silariang, yaitu; laki-laki dan perempuan dengan kehendak bersama secara rahasia keduanya menuju rumah penghulu adat atau penghulu agama minta dilindungi dan dikawinkan tanpa melalui pencatatan dan persetujuan walinya.
2. Rilarian, yaitu; perempuan dibawa secara paksa oleh laki-laki ke rumah penghulu adat untuk minta dilindungi dan selanjutnya minta dikawinkan tanpa dilakukan secara prosedural atau tanpa mengikuti ketentuan perundang-undangan perkawinan.
3. Perempuan atas kemauan sendiri datang ke penghulu adat atau penghulu agama untuk dikawinkan dengan laki-laki tertentu tanpa melalui pencatatan dan tanpa persetujuan walinya atau kedua orang tuanya.<sup>10</sup>

Ketiga bentuk perkawinan tersebut, dipandang sebagai bentuk perkawinan yang menyimpang dari pada prosesi perkawinan menurut

---

<sup>9</sup>H. Nasaruddin, S.Ag, Pembantu PPN Kelurahan Lagaligo, *Wawancara*, Tanggal 24 Oktober 2010, di Palopo

<sup>10</sup>Drs. H. Nurul Haq, MHI, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2010, di Palopo

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dikategorikan sebagai peristiwa perkawinan di bawah tangan. Dengan demikian, tidak mempunyai kekuatan hukum karena dipandang tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, orang yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan tidak berhak mendapat surat nikah atau akta nikah dari Kantor Urusan Agama.

Sedangkan menurut Muh. Jaddar bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo, dapat dilihat dalam bentuk perkawinan adat. Maksudnya bahwa sebagian masyarakat masih menganggap bahwa perkawinan cukup dilaksanakan menurut ketentuan adat yang diwarisi secara turun temurun. Oleh karena itu, mengikuti ketentuan perundang-undangan perkawinan dipandang tidak terlalu penting. Dalam hal ini, keabsahan suatu perkawinan dilihat sudut pandang ketentuan adat, sehingga walaupun tidak mengikuti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinannya tetap dianggap sah.<sup>11</sup>

Dalam sistem perkawinan adat, pencatatan perkawinan tidak menjadi persyaratan tentang keabsahan suatu perkawinan. Oleh karena itu, walaupun peristiwa tidak dicatat tetap dipandang sah dan mengikat kedua belah pihak, sepanjang memenuhi ketentuan adat. Demikian pula sebaliknya, suatu peristiwa perkawinan walaupun telah memenuhi ketentuan perundang-undangan perkawinan atau telah dicatat, akan tetapi

---

<sup>11</sup>Drs. Muh. Jaddar, Pembantu PPN Kelurahan Dangerakko, *Wawancara*, Tanggal 23 Oktober 2010, di Palopo

jika tidak memenuhi ketentuan adat, maka perkawinan itu dipandang kurang afdal atau kurang sempurna. Ini berarti bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimanahkan oleh Undang-undang perkawinan, tidak termasuk persyaratan yang sakral dan bukan suatu ikatan yang kuat bagi suatu perkawinan.<sup>12</sup>

Kasus yang serupa juga dikemukakan oleh Masykur Muh. Neng bahwa peristiwa perkawinan di bawah tangan terjadi dalam bentuk perkawinan secara agama. Maksudnya bahwa perkawinan yang dilangsungkan tidak mesti dicatat sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan. Menurutny bahwa dalam ajaran Islam, khususnya kitab-kitab fikih tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengharuskan perkawinan dicatat. Oleh karena itu, jika perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang terdapat kitab-kitab fikih klasik, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum walaupun tidak tercatat.<sup>13</sup>

Kecenderungan sebagian masyarakat untuk melaksanakan perkawinan cukup dengan mengacu pada ketentuan fikih, pada dasarnya disebabkan oleh alasan bahwa dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan

---

<sup>12</sup>Drs. Muh. Jaddar, Pembantu PPN Kelurahan Dangerakko, *Wawancara*, Tanggal 23 Oktober 2010, di Palopo

<sup>13</sup>Masykur Muh. Neng, Pembantu PPN Kelurahan Pajalesang, *Wawancara*, Tanggal 27 Oktober 2010, di Palopo

yang sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan berdasar pada ketentuan agama sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab fikih munakahat yang mu'tabarah, telah mendapat kekuatan hukum yang kuat. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun dan syarat yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.<sup>14</sup>

Selain itu, perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo, juga ditemukan dalam bentuk perkawinan poligami. Menurut Nasaruddin bahwa laki-laki yang berpoligami atau beristeri lebih dari dua, pada umumnya hanya perkawinan yang pertama dicatat, sedangkan perkawinan kedua dilakukan di luar pencatatan. Khusus di Kecamatan Wara, perkawinan di bawah tangan dalam bentuk poligami selalu dilakukan secara diam-diam dan tanpa pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, orang yang akan berpoligami cukup meminta persetujuan kepada wali perempuan dan selanjutnya mendatangi penghulu atau ahli agama untuk dikawinkan.<sup>15</sup>

Pandangan yang senada juga dikemukakan oleh Hendra bahwa hampir semua perkawinan poligami dilakukan di bawah tangan atau tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini dilakukan untuk menghindari atau

---

<sup>14</sup>Drs. Muh. Ya'rif Ahmad, Tokoh Agama Kecamatan Wara, *Wawancara*, Tanggal 27 Oktober 2010, di Wara

<sup>15</sup>H. Nasaruddin, S.Ag, Pembantu PPN Kelurahan Lagaligo, *Wawancara*, Tanggal 24 Oktober 2010, di Palopo

tidak ingin diketahui oleh keluarganya, khususnya dari pihak isteri. Di samping itu, perkawinan poligami dilakukan di luar pencatatan atau dilangsungkan di bawah tangan karena syarat berpoligami sangat sulit dan susah untuk dipenuhi. Oleh karena itu, perkawinan poligami dilakukan secara rahasia dan tidak melalui pencatatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan. Bahkan, banyak kasus seseorang diketahui beristeri lebih dari satu atau berpoligami, setelah mempunyai anak dari isterinya yang kedua.<sup>16</sup>

Bentuk lain perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo adalah perkawinan paksa, yaitu perkawinan yang dilangsungkan karena salah satu pihak terpaksa atau dipaksa untuk kawin. Kawin terpaksa biasanya terjadi karena laki-laki dan perempuan kedapatan atau ketahuan melakukan hubungan gelap tanpa ada ikatan perkawinan. Sedangkan kawin dipaksa biasanya terjadi karena perempuan hamil di luar nikah, sehingga laki-laki dipaksa oleh pihak perempuan untuk mengawininya. Baik kawin karena terpaksa ataupun dipaksa sering dilakukan secara mendadak tanpa melakukan pencatatan sesuai dengan Undang-undang perkawinan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hampir semua peristiwa perkawinan yang dilakukan

---

<sup>16</sup>Hendra, S,Pd, Pembantu PPN Kelurahan Tompotikka, *Wawancara*, Tanggal 2 Nopember 2010, di Palopo

secara terpaksa, berlangsung tanpa mengikuti ketentuan Undang-undang perkawinan.<sup>17</sup>

Fenomena perkawinan paksa yang terjadi di masyarakat, menarik untuk dibicarakan, khususnya dari segi legalitas hukumnya dan tingkat keabsahannya. Dikatakan demikian karena jika perkawinan paksa dimaknai sebagai perkawinan di mana salah satu di antara laki-laki dan perempuan terpaksa atau dipaksa untuk kawin, maka hal itu bertentangan dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang berlangsung atas kerelaan kedua belah pihak. Itu artinya bahwa jika salah satu di antara laki-laki atau perempuan yang merasa terpaksa atau tidak rela, maka perkawinan itu cacat demi hukum dan dapat dikategorikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak sah atau perkawinan di bawah tangan.

Perkawinan di bawah tangan juga dapat dilihat ketika laki-laki dan perempuan ditangkap basah berdua-duaan atau berhubungan seksual oleh petugas keamanan atau masyarakat, kemudian keduanya dibawa ke tempat penghulu adat atau penghulu agama untuk dikawinkan. Terdapat banyak kasus, seseorang dikawinkan karena ditangkap oleh Satpol Pamong Praja atau Polisi melakukan hubungan badan dengan seorang

---

<sup>17</sup>Drs. Muh. Ya'rif Ahmad, Tokoh Agama Kecamatan Wara, *Wawancara*, Tanggal 27 Oktober 2010, di Wara

perempuan. Namun, permasalahan adalah jika keduanya dipaksa untuk kawin oleh Polisi atau Satpol Pamong Praja dengan cara memanggil orang tua kedua belah pihak dan penghulu. Perkawinan yang demikian itu, termasuk salah satu bentuk perkawinan di bawah tangan karena tidak melalui pencatatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.<sup>18</sup>

Dalam tradisi masyarakat Luwu dan Bugis dikenal adanya istilah kawin *passampo siri*, yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat jika seorang perempuan yang hamil di luar nikah, dan ternyata laki-laki yang menghamilinya tidak berada di tempat, atau laki-laki tersebut terdapat larangan untuk kawin karena mempunyai hubungan darah atau muhrim, maka diminta atau ditunjuk kesediaan seorang laki-laki lain untuk mengawininya agar kehormatan pihak perempuan tetap terjaga. Biasanya, perkawinan semacam ini dilakukan dengan mendatangi penghulu agama untuk akad nikah dan setelah akad nikah laki-laki kembali ke rumahnya dan perempuan juga kembali ke rumahnya.<sup>19</sup>

Dilihat dari sudut pandang Islam, perkawinan *passampo siri* merupakan bentuk perkawinan yang bertentangan dengan asas dan tujuan perkawinan. Dikatakan demikian karena dalam perkawinan dalam Islam

---

<sup>18</sup>Hendra, S.Pd, Pembantu PPN Kelurahan Tompotikka, *Wawancara*, Tanggal 2 Nopember 2010, di Palopo

<sup>19</sup>Drs. HM. Zainuddin, MA, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tanggal 25 Oktober 2010, di Palopo

bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia untuk selamanya. Sedangkan dalam perkawinan *passampo siri* hanya bersifat sementara dan tidak bertujuan untuk selamanya. Dalam hal ini, setelah akad nikah diikrarkan, maka saat itu juga terjadi perceraian atau tidak ada akibat hukum yang timbul dari akad nikah. Demikian pula jika dilihat dari sudut pandang Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan *passampo siri* di samping bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perkawinan, juga merupakan peristiwa perkawinan yang tidak tercatat. Oleh karena itu, perkawinan *passampo siri* dikategorikan sebagai salah satu bentuk perkawinan di bawah tangan.

Motif dilaksanakannya perkawinan *passampo siri* sebagai salah satu bentuk perkawinan di bawah tangan adalah untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki yang menghamilinya. Disamping itu, bertujuan untuk melepaskan si ibu dan anaknya dari sanksi adat. Perkawinan ini hanya sifatnya sementara karena yang diharapkan hanya akad nikahnya, bukan kerukunan dan kelanggengan dalam membangun rumah tangga yang menjadi tujuan. Jika akad nikah selesai dilaksanakan maka laki-laki tersebut langsung meninggalkan isterinya tanpa menggaulinya dan memberi nafkah.



Dalam konteks tersebut, terjadinya peristiwa perkawinan di bawah tangan (dengan berbagai bentuknya), menurut H. Nurul Haq bahwa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap Undang-undang perkawinan. Di samping itu, juga disebabkan oleh minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang perkawinan. Memang disadari bahwa selama ini, sosialisasi Undang-undang perkawinan, khususnya Kompilasi Hukum Islam belum maksimal dilakukan. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan tenaga penyuluh dan keterbatasan kemampuan pendanaan. Oleh karena itu, wajar jika sampai sekarang ini masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan.<sup>20</sup>

Pandangan yang senada juga dikemukakan oleh HM. Arif bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-undang perkawinan menjadi faktor penyebab terjadinya peristiwa perkawinan di bawah tangan. Oleh karena itu, seharusnya dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan yang dilakukan tidak hanya yang berkaitan dengan kegiatan peribadatan seperti, shalat, puasa, haji dan zakat, akan tetapi menyangkut masalah-masalah hukum, seperti penyuluhan hukum perkawinan. Ini

---

<sup>20</sup>Drs. H. Nurul Haq, MHI, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2010, di Palopo

penting karena pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, juga termasuk bagian larangan dalam Islam.<sup>21</sup>

Sementara itu, menurut Hj. Saidah Nasta bahwa di antara penyebab terjadinya peristiwa perkawinan di bawah tangan pada umumnya disebabkan karena perkawinannya memang bermasalah. Dalam hal ini, seseorang melakukan perkawinan di bawah tangan karena menurut Undang-undang memang terdapat larangan untuk kawin, misalnya; seorang pegawai negeri yang akan berpoligami, tentu tidak akan melakukan pencatatan karena tidak ingin perkawinannya diketahui oleh orang lain. Selain itu, orang yang hamil di luar nikah juga cenderung melangsungkan perkawinan di bawah tangan karena sulit memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang, misalnya mendapatkan restu dari wali atau orang tuanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkawinan di bawah tangan merupakan jalan pintas untuk mengabsahkan hubungan seseorang dengan dalih sudah sesuai dengan ajaran agama dan terhindar dari tuduhan melakukan zina.<sup>22</sup>

Berbeda dengan pandangan HM. Zainuddin Samide bahwa perkawinan di bawah tangan terjadi karena lemahnya penegakan hukum atau sanksi hukum yang diberikan kepada orang yang melakukan

---

<sup>21</sup>Drs. HM. Arif R, M.Pd.I, Tokoh Agama, *Wawancara*, Tanggal 23 Nopember 2010, di Palopo

<sup>22</sup>Dra. Hj. Saidah Nasta, MPd.I, Kepala Seksi Urais dan Penyuluhan Haji Kementerian Agama Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 25 Oktober 2010, di Palopo

perkawinan di bawah tangan dan orang atau penghulu yang mengawinkannya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa tidak ada tindakan yang tegas dari pejabat yang berwenang terhadap pelaku perkawinan di bawah tangan. Sementara itu, perkawinan di bawah tangan dipandang cara yang paling praktis dan biaya yang paling murah untuk melakukan perkawinan.<sup>23</sup>

Lebih jauh berbicara tentang motif terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain:

1. Tidak adanya sanksi hukum yang tegas bagi pelaku perkawinan di bawah tangan.
2. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan atau perundang-undangan perkawinan.
3. Lemahnya langkah-langkah preventif dan mendidik dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama Kota Palopo terhadap orang atau tokoh agama yang mengawinkan seseorang secara di bawah tangan.

---

<sup>23</sup>Drs. HM. Zainuddin, MA, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tanggal 25 Oktober 2010, di Palopo

4. Sosialisasi terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan, khususnya masyarakat awam.<sup>24</sup>

Menurut Nasaruddin Abdullah bahwa terjadinya peristiwa perkawinan di bawah tangan, khususnya di Kecamatan Wara disebabkan oleh empat faktor, yaitu;

1. Hukum (baca; fikih) yang dianut oleh masyarakat tidak mengatur batas minimal usia dibolehkannya melakukan pernikahan, sehingga masih ditemukan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan di luar pencatatan.
2. Faktor pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum yang masih rendah.
3. Adanya kekhawatiran gagalnya perkawinan yang akan dilaksanakan jika dicatat, khususnya orang yang kawin untuk berpoligami.
4. Faktor penafsiran dan keyakinan terhadap ajaran agama yang dipahami. Bagi mereka, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, ketentuan Undang-undang

---

<sup>24</sup>Drs. H. Nurul Haq, MHI, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2010, di Palopo

tidak mempengaruhi kehalalan hubungan biologis atau hubungan suami isteri.<sup>25</sup>

Mengacu pada beberapa pandangan tentang bentuk dan motif peristiwa perkawinan di bawah tangan, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kendatipun perkawinan mempunyai aturan yang jelas dalam perundang-undangan, akan tetapi tampaknya masih menyisakan berbagai persoalan. Paling tidak, pertanyaan yang muncul adalah mengapa Undang-undang perkawinan, baik UU. No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 belum ditaati atau dijadikan pedoman secara maksimal oleh masyarakat.

Di samping itu, perkawinan di bawah tangan yang masih terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo, juga dipandang sebagai masalah sosial dan agama. Dikatakan demikian karena jika perkawinan di bawah tangan terus dibiarkan terjadi akan menyebabkan keresahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, perkawinan di bawah tangan jika tidak mendapatkan upaya-upaya pencegahan dari pemerintah, akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Oleh karena itu, perkawinan di bawah tangan yang terjadi harus mendapat perhatian dari semua pihak, bukan hanya pemerintah, akan tetapi juga diperlukan keterlibatan tokoh agama dan masyarakat.

---

<sup>25</sup>Drs. H. Nasaruddin Abdullah, Tokoh Masyarakat Kecamatan Wara, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2010, di Palopo

## **B. Perspektif Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang yang mengatur perkawinan bagi warga negara Republik Indonesia, yang berlaku secara nasional baik yang beragama Islam maupun non Islam. Oleh karena itu, semua peristiwa perkawinan harus mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang ini. Suatu peristiwa perkawinan yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-undang, maka perkawinan itu tidak mempunyai landasan atau dasar hukum.

Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup> Ini berarti bahwa peristiwa perkawinan yang dilegalisir oleh Undang-undang ini adalah perkawinan yang dilaksanakan untuk selamanya, bukan dalam waktu yang bersifat sementara. Oleh karena itu, perkawinan *passampo siri* dan kawin *pura* sebagai salah satu bentuk perkawinan di Kecamatan Wara Kota Palopo, pada dasarnya bertentangan dengan asas dan tujuan perkawinan. Dengan demikian,

---

<sup>26</sup>H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.III:Yayasan al-Hikmah; Jakarta, 1993), h. 123

dapat dikatakan bahwa semua bentuk perkawinan yang dimaksudkan hanya bersifat sementara dan tidak bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, termasuk dalam cakupan perkawinan yang cacat hukum. Implikasi perkawinan yang cacat hukum adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 diatur tentang tata cara melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagi seseorang yang bermaksud melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah.<sup>27</sup> Pemberitahuan kehendak nikah boleh dilakukan oleh orang tua atau walinya. Pegawai pencatat perkawinan setelah menerima laporan atau pemberitahuan kehendak nikah, segera meneliti kelengkapan syarat-syarat perkawinan menurut agama dan undang-undang. Jika syarat administrasi belum terpenuhi, maka Pegawai Pencatat Nikah segera memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk segera dipenuhi.

Akan tetapi, jika terdapat halangan kawin menurut agama dan undang-undang, maka Pegawai Pencatat Nikah harus menolak kehendak nikah dan tidak boleh membiarkan perkawinan terjadi. Sebaliknya, jika syarat-syarat nikah telah memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh

---

<sup>27</sup> Pasal 3 ayat 1 PP. No.9 Tahun 1975. *Ibid.*, h. 151.

peraturan yang berlaku, maka Pegawai Pencatat Nikah membuat pengumuman tentang pemberitahuan yang dapat dibaca oleh khalayak ramai. Dalam hal ini, pengumuman kehendak nikah harus ditempelkan pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai jika keduanya berlainan tempat tinggal. Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut ditempelkan.<sup>28</sup> Ketentuan ini dimaksud untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang menurut pendapatnya perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada halangan menurut agama dan undang-undang atau tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Dipahami dari ketentuan di atas bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini penting karena pencatatan perkawinan merupakan bukti autentik yang menunjukkan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, akurasi keabsahan hukumnya dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, semua bentuk perkawinan di luar pencatatan, dipandang perkawinan yang berlangsung di bawah tangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Apapun bentuk dan

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 3 ayat 2



motif perkawinan di luar pencatatan atau perkawinan di bawah tangan, tetap dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan perbuatan yang melanggar hukum harus diberikan atau mendapat sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan harus dihadiri oleh saksi dan dihadiri pula oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>29</sup> Seseorang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka akad nikahnya dilaksanakan oleh wali nikah atau orang yang mewakilinya. Sesaat sesudah berlangsungnya pernikahan atau akad nikah, maka kedua belah pihak mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, seterusnya diikuti pula oleh saksi-saksi, wali nikah, dan pegawai pencatat nikah yang bertugas untuk mencatat peristiwa perkawinan. Jika penandatanganan akta perkawinan telah selesai, maka perkawinan yang telah dilaksanakan dianggap sah dan telah tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>30</sup>

Akta perkawinan adalah sebuah daftar besar yang memuat

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 153

<sup>30</sup> Pasal 11 ayat 1 s/d 3 PP. No. 9 Tahun 1975

identitas kedua mempelai, orang tua atau walinya atau juga wakilnya. Kutipan akta perkawinan yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah menjadi bukti autentik bagi kedua suami dan isteri bahwa benar telah berlangsung peristiwa perkawinan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, suami isteri yang memiliki akta nikah berarti berhak mendapat jaminan dan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, salah satu motif terjadinya peristiwa perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo adalah calon pengantin atau orang yang akan kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pembatasan usia kawin, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Batas minimal usia kawin yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Penyimpangan dari batas minimal usia perkawinan harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan.<sup>31</sup> Artinya bahwa seseorang yang belum mencapai usia yang ditetapkan oleh undang-undang tidak dibenarkan kawin walaupun mendapat izin dan persetujuan dari orang tua atau

---

<sup>31</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 dan 2

walinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, secara normatif dapat dipahami bahwa perkawinan di bawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan di bawah umur jika tidak mendapatkan dispensasi dari pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, peristiwa perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dari pengadilan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo, dipandang sebagai perkawinan di bawah tangan dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, perkawinan paksa sebagai salah bentuk perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo, pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dikatakan demikian karena dalam Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>32</sup> Demikian pula dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 dikemukakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

---

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), h. 14.

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>33</sup> Dengan demikian, perkawinan pada hakikatnya adalah perjanjian yang mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak berdasarkan prinsip suka sama suka dan jauh dari segala yang dapat diartikan sebagai suatu paksaan.

Perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Wara, juga dilakukan oleh orang yang berpoligami atau beristeri lebih dari satu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menganut asas poligami, akan tetapi mempunyai syarat-syarat yang ketat. Dalam hal ini, berpoligami dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pada pasal 4-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 40- 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa jika seseorang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, yakni melayani kebutuhan rohani suami.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

---

<sup>33</sup>Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. I; Surabaya : Karya Ilmu, t.th.), h. 9-10.

### 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas suami yang akan berpoligami harus mendapatkan persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya dalam bentuk lisan atau tertulis. Demikian pula suami harus mempunyai kemampuan memberikan nafkah dan menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya secara adil. Jika suami tidak mampu memenuhi syarat berpoligami sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, maka Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatat perkawinan bagi seorang suami yang akan berpoligami.<sup>34</sup>

Ketat dan sulitnya persyaratan poligami yang ditetapkan dalam Undang-undang, sehingga suami yang akan berpoligami cenderung mengambil jalan pintas, yaitu kawin di bawah tangan. Menurut H. Nurul Haq bahwa di Kecamatan Wara Kota Palopo memang terdapat beberapa kasus yang ditolak untuk melaksanakan perkawinan, salah satu di antaranya adalah suami yang akan berpoligami karena tidak mendapat izin poligami dari pengadilan Agama.<sup>35</sup>

Pada konteks tersebut, perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo merupakan cara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat karena menghindarkan diri dari sistem dan

---

<sup>34</sup> Pasal 41 ayat (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun /1975

<sup>35</sup> Drs. H. Nurul Haq, MHI, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2010, di Palopo

cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut UU.No.1 Tahun 1974. Bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan beranggapan bahwa sistem perkawinan yang diatur dalam Undang-undang terasa sangat birokratis dan berbelit-belit serta membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, mereka menempuh jalan pintas dengan melakukan perkawinan di luar pencatatan yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam ilmu hukum, perkawinan di bawah tangan disebut dengan istilah penyelundupan hukum, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Walaupun perkawinan dilangsungkan menurut pemahaman mereka sesuai ketentuan syariat Islam, akan tetapi jika tanpa melalui pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka hal itu tetap termasuk di bawah tangan atau pelanggaran hukum. Artinya, kendatipun perkawinan dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, akan tetapi tidak mengindahkan peraturan yang berlaku secara positif, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak cukup jika hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan semata, akan tetapi harus dilihat dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, Islam mendefenisikan perkawinan sebagai *mitsāqan ghalīdzan*, yakni perjanjian yang suci, kuat dan kokoh. Sebagai *mitsāqan ghalīdzan*,

perkawinan mesti dilihat dari berbagai sisi, paling tidak terdapat tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu agama, hukum, dan sosial.<sup>36</sup>

Dari sisi agama, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yang bersumber pada Alquran dan hadis. Perkawinan yang menyimpang dari ajaran agama (Islam) adalah perkawinan yang tidak sah dan dicegah pelaksanaannya. Sedangkan dari sisi hukum, perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian atau perikatan antara dua pihak. Oleh karena itu, sebagai suatu perjanjian perkawinan harus diatur dan diikat oleh suatu aturan hukum yang jelas dan pasti. Sementara dari sisi sosial, perkawinan termasuk perkara sosial yang berkaitan dengan tata hubungan sosial dan kekerabatan serta kemasyarakatan, sehingga nilai-nilai atau norma-norma sosial yang telah dianut oleh masyarakat tidak boleh diabaikan.

Dengan demikian, perkawinan di bawah tangan tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian yang kokoh karena mengabaikan salah satu aspek tersebut, yakni aspek hukum. Di dalam kitab-kitab fikih tidak ditetapkan keharusan pencatatan sebagai salah satu rukun dan syarat sah perkawinan, akan tetapi jika dilihat dari sisi maslahatnya justru pencatatan bukti hukum yang paling autentik. Oleh karena itu, ketetapan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan harus dicatat, merupakan ijtihad yang

---

<sup>36</sup> A.Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No.28, Tahun VII, 1996, h. 20.

bersumber dari Alquran dan hadis. Dengan demikian, tidak ditemukan alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak penting. Bahkan, sebaliknya pencatatan perkawinan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan rukun dan syarat perkawinan.

Peraturan pemerintah yang melarang perkawinan dilangsungkan di luar pencatatan (baca; di bawah tangan) sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, mengandung sisi maslahat yang sangat besar demi menghindari atau mencegah terjadinya kemudharatan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang mengatakan: **درء المفسد مقدم على جلب المصالح** (menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan) dan **تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة** (suatu tindakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, pada dasarnya berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya).<sup>37</sup>

### **C. Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan**

Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau di luar pencatatan yang sah, dapat dipastikan mengandung masalah, baik pada diri pelakunya maupun akibat-akibat lain yang ditimbulkan. Di Indonesia, perkawinan yang tidak bermasalah adalah perkawinan yang

---

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet.II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977), h. 121.



dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam, perkawinan yang tidak beramasalah adalah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU.No.1/1974 dan dicatat menurut ayat (2) dalam pasal yang sama. Kemudian diumumkan melalui pesta perkawinan (*walimat al-ursy*), agar perkawinan tersebut diketahui oleh orang banyak.

Dilihat dari perspektif teori hukum bahwa suatu tindakan atau perbuatan, dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan hukum adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum, yakni mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>38</sup> Perkawinan merupakan peristiwa hukum sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya peristiwa perkawinan, tidak cukup hanya dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk.<sup>39</sup>

Sebagai perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum, baik bagi suami, isteri, maupun anak yang lahir akibat perkawinan tersebut, seperti penyelesaian harta bersama, penguasaan

---

<sup>38</sup> A. Gani Abdullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*, dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 23/Thn. VI 1995, h. 47-48

<sup>39</sup> Wildan Suyuti Mustafa, *Nikah Sirri: Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum*, dalam *Mimbar Hukum*, No.20 Tahun VII, 1996, h. 34.

anak, sah atau tidaknya seorang anak, termasuk mengenai proses pembagian harta warisan. Sedangkan perkawinan yang berakibat hukum adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dibuktikan melalui akta nikah.

Suatu perkawinan yang dilaksanakan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikategorikan sebagai perkawinan di bawah tangan yang melahirkan permasalahan hukum. Pada gilirannya, permasalahan hukum yang muncul dari perkawinan di bawah tangan justru merugikan orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam hal ini, perkawinan di bawah tangan dianggap tidak pernah terjadi sehingga dapat mendapat jaminan dan perlindungan hukum untuk memperoleh hak-haknya, baik sebagai isteri maupun sebagai suami.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa ikatan suami isteri berakibat pada saling mewarisi, akan tetapi jika perkawinannya di langsunkan di luar pencatatan, maka hak saling mewarisi menjadi gugur. Demikian pula dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, tidak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya. Selain itu, anak perempuan yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, ayahnya tidak dapat menjadi wali dalam perkawinannya karena antara anak dengan ayahnya tidak diakui mempunyai hubungan nasab dengan bapak kandungnya.

Ketentuan tersebut, dapat dilihat pada pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dan pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>40</sup>
2. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>41</sup>

Dengan demikian, orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan, berarti tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, sehingga tidak berhak mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh hukum untuk mendapatkan segala hak-hak yang timbul dari perkawinannya. Demikian pula dengan orang melakukan perkawinan di bawah tangan berarti dengan sadar keluar dari sistem hukum perkawinan yang berlaku dan memutuskan hubungan nasab dengan anaknya yang lahir kelak.

Dalam pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 dikemukakan bahwa perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-

---

<sup>40</sup> Undang-undang Pewrkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h. 23.

<sup>41</sup> Abdurrahman, *Kompiladsi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Departemen Agama RI, 1994), h. 48.

masing agama dan kepercayaannya.<sup>42</sup> Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.<sup>43</sup>

Mengacu pada ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sebagai perkawinan yang sah jika dilakukan menurut hukum agama. Dalam hal ini, bagi yang beragama Islam harus dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan Islam, yakni sesuai dengan tata cara ajaran Islam. Namun demikian, semua perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran agama yang diyakini, harus dicatat pegawai pencatat nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>44</sup> Selanjutnya pasal ini dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9

---

<sup>42</sup>Penyusun, *Undang-undang Perkawinan*, (Surabaya : Karya Ilmu, t.th.), h. 8.

<sup>43</sup> Ny.Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet.II; Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 162.

<sup>44</sup>Penyusun, *loc.cit.*

tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>45</sup>

Mencermati ketentuan tersebut, pelaksanaan perkawinan terdapat dua kemungkinan, yaitu: *pertama*, perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan, yakni hanya dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama saja. *Kedua*, perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 secara simultan, yakni di samping dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama juga dilakukan pencatatan. Jika kemungkinan yang pertama dipilih, maka perkawinan dianggap sah menurut ajaran agama sesuai dengan permintaan pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan, akan tetapi belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum, sehingga belum mendapat kekuatan dan pengakuan secara hukum.<sup>46</sup>

Pada tataran ini, dapat dikatakan bahwa perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan hukum jika memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan perkawinan. Dalam hal ini, unsur ketentuan agama dan unsur ketentuan pencatatan atau Undang-undang

---

<sup>45</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum*, (Cet. I; Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 124.

<sup>46</sup> A.Gani Abdullah, *op.cit.*, h. 48.

harus berfungsi secara komulatif dan bukan alternatif. Ketentuan agama berfungsi sebagai legalitas keabsahan perkawinan, sedangkan ketentuan perundang-undangan berfungsi sebagai legalitas perbuatan hukum. Legalitas perkawinan sebagai perbuatan hukum menjadi syarat pengakuan dan perlindungan terhadap segala hak-hak yang timbul dari perkawinan. Itu artinya bahwa jika perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan agama (Islam) saja dan tidak dilakukan menurut kehendak tata cara pencatatan, maka akibat hukumnya adalah belum dapat memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum berupa perolehan akta nikah.

Kaitannya dengan hal tersebut, pada pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap peristiwa perkawinan harus dicatat. Implikasi dari ketentuan ini, dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa:

1. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>47</sup>

Mencermati ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dipahami bahwa pencatatan perkawinan

---

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam diIndonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 1997/1998), h. 15.

merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Mengingat perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo, pada umumnya menyalahi ketentuan pencatatan. Dengan demikian, perkawinan di bawah tangan dengan berbagai bentuk dan motifnya di Kecamatan Wara tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, melainkan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum. Akibat hukum yang timbul adalah jika salah satu pihak dari suami isteri melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Akibat lain yang muncul dari perkawinan di bawah tangan adalah jika terjadi perceraian, maka perceraian itu juga harus dilakukan di bawah tangan. Sedangkan perceraian yang terjadi di bawah tangan juga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang mempunyai jaminan dan perlindungan. Dengan demikian, perkawinan di bawah tangan sebagai suatu pelanggaran hukum, akan mempengaruhi tatanan dan mekanisme hukum lainnya. Pada gilirannya, akan memberikan akibat negatif yang lebih besar dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Mengacu pada uraian yang telah dikemukakan, ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peristiwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan motif. Perkawinan di bawah tangan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Wara pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu: rendahnya pendidikan, lemahnya kesadaran hukum, mengambil jalan pintas, pemahaman tentang keabsahan perkawinan, menghindari peraturan yang dirasa sangat birokratis dan berbelit-belit serta perkawinannya tidak diketahui oleh orang banyak. Sedangkan bentuk-bentuk perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo, yaitu;
  - a. *Silariang*, yakni kedua calon mempelai mendatangi penghulu untuk minta dikawinkan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang.
  - b. Kawin poligami, yakni melaksanakan akad nikah atau perkawinan di depan penghulu tanpa melakukan pencatatan sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang karena tidak ingin diketahui dan



penghulu menolak mengawinkannya karena tidak memenuhi persyaratan untuk berpoligami, sehingga memilih kawin di bawah tangan.

- c. Kawin adat, yakni perkawinan dilaksanakan cukup dengan memenuhi ketentuan adat tanpa mengikuti ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
  - d. Kawin agama, yakni perkawinan yang dilaksanakan cukup dengan mengikuti ketentuan agama dan mengabaikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Kawin paksa, yakni perkawinan dilaksanakan karena terpaksa atau dipaksa karena hamil di luar nikah atau karena hanya untuk menutupi aib keluarga. Biasanya perkawinan seperti ini disebut dengan istilah kawin cerai (bugis; kawin *pura*), yaitu setelah akad nikah diucapkan, maka saat itu juga terjadi perceraian.
2. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut ajaran agama dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang berlangsung di luar pegawai pencatat nikah berarti termasuk perkawinan yang tidak tercatat, sedangkan semua perkawinan yang tidak tercatat setelah Undang-undang ini berlaku dianggap sebagai perkawinan di bawah tangan. Sementara itu, perkawinan yang berlangsung di bawah tangan

dipandang sebagai perbuatan yang tidak pernah terjadi atau tidak diakui keabsahannya oleh Undang-undang.

3. Akibat yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan adalah tidak dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Sebuatan suatu perbuatan yang tidak diakui sebagai perbuatan hukum, tidak mempunyai akibat hukum berupa jaminan dan perlindungan hukum untuk memperoleh hak-haknya. Suatu perkawinan dipandang sebagai perbuatan hukum dan mempunyai akibat hukum jika dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan, yakni harus melalui pencatatan atau terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Akibat lain yang muncul dari perkawinan di bawah tangan adalah jika terjadi perceraian, maka perceraian itu juga harus berlangsung di bawah tangan. Implikasinya adalah dapat merugikan kedua belah pihak dan anak-anaknya dalam memperoleh hak-hak yang timbul akibat perkawinan.

## **B. Rekomendasi**

Mengacu pada pembahasan yang telah dikemukakan di atas, diajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diperlukan kajian yang lebih intens tentang fenomena perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

2. Diperlukan sosialisasi dan pendidikan hukum bagi masyarakat, khususnya tentang Undang-undang perkawinan agar masyarakat mempunyai pemahaman yang benar terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan. Pada gilirannya dapat menjadi langkah antisipatif bagi terjadinya peristiwa perkawinan di bawah tangan. Di samping itu, juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang akibat hukum perkawinan di bawah tangan yang merugikan bagi suami isteri dan anak-anaknya.
3. Dalam memaksimalkan upaya pencegahan terjadinya perkawinan di bawah tangan, maka perlu diberikan sanksi hukum yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perkawinan di bawah tangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. Gani, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*, dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 23/Thn. VI 1995
- Abdurrahman, *Kompiladsi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Departemen Agama RI, 1994
- Abu Bakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.III:Yayasan al-Hikmah; Jakarta, 1993
- Anderson, J.N.D., *Islamic Law in Modern World*, alih bahasa oleh Machnun Husain dengan judul : *Hukum Islam di Dunia Modern*, Cet. I; Surabaya : Amar Press, 1991
- Aulawi, A.Wasit, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No.28, Tahun VII, 1996
- al-Barusu, Ismail Hak, *Tafsīr Rūḥul Bayān* Jilid III, Qadsa Ali, 1137
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam diIndonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 1997/1998
- , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Djamali, R. Abdul, *ukum-Hukum Islam*, Cet; III, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Doi, A. Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

- Fachruddin, Fuad Mohd., *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992
- Fyzee, Asaf A. A., *Outlines of Muhammadan Law*, t.c. Delhi: Oxford University Press, 1974
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet. II; Bandung: Alumni, 1983
- Haq, Hamka, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makassar : Yayasan al-Ahkam, 2003
- Hazairin , *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tinmas, 1961
- Hosen, Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk*, Cet. I; Jakarta: Ihya' Ulumuddin, 1973
- Husain, Syarifudin, *Perkawinan di Bawah Tangan Ditinjau dari Sudut Perkawinan di Kabupaten Bone*, Tesis, Tidak Ditebitkan: 2003
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum*, Cet. I; Jakarta: Pradnya Paramita, 1986
- al-Jabbar, Abd, *Syarh al-Ushul al-Khamsah*, Mishr: Maktabat Wahbat, 1965
- al-Jaziriy, 'Abd al-Rahman, *Kitāb al-Fiqhu 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Mesir: al-Maktab al-Tijariyah al-Kubra, 1969
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Cet. I; Bandung: Alumni, 1985
- al-Khatib, Muhammad al-Sharbini, *Mughnī al-Muhtāj* Juz III, Mesir; Mustafa al-Babbiy al-Halabi wa Awladuh, 1957
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008

- Mahkamah Agung RI., *Penemuan Hukum dan Pemecahan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung, t. th.
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Mukhtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet; III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Mustafa, Wildan Suyuti, *Nikah Sirri: Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum*, dalam *Mimbar Hukum*, No.20 Tahun VII, 1996
- al-Nasaiburi, Abi Husaeni Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid II, Bandung: Dahlan, t.th.
- Penyusun, *Undang-undang Perkawinan*, Surabaya : Karya Ilmu, t.th.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, Cet. I; Surabaya : Dunia Ilmu, 1995
- al-Qurthubiy, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansariy, *Al-jami' al-Ahkam al-Qur'an* , Jilid XII, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993
- Rahmatunnair, *Eksistensi Maslahat dan Ruang Lingkupnya dalam Hukum Islam*, Makalah, Disampaikan pada Kajian Bulanan Forum Kajian Ilmiah Ulul Albab STAIN Watampone tahun 2008
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU. No. I tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet; II, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Rasdiyanah, Andi, *Problematika dan Kendala yang dihadapi hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke Dalam Hukum Nasional*; Disampaikan pada seminar nasional tentang Kontribusi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional setelah limapuluh Tahun Indonesia Merdeka, dalam rangka Reuni I IKA Syari'ah IAIN Alauddin Makassar

Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* Jilid II, Kuwait : Dar al-Bayan, 1979

-----, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, Cet. I; Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1980

-----, *Fiqh Sunnah*, Jilid VI, Cet; XV, Bandung: PT. Al Maarif, t. th.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet.II; Jakarta: Mizan, 1996

Smith, Harold H Tutis Marylin S., dan Richard T. Nolan , *Living issues in Philosophy*, New York :D van Nostrand Co., 1979

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet; IV, Yogyakarta: Liberty, 1999

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992

al-Syathibi, Abu Ishak, *al-Muwāfaqat fī Ushūl al-Syarī'ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Cet; V, Jakarta: UI-Pres, 1986

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III., Cet. I; Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001

Ulwan, Abdullah Nashih, *Adān al-Khitbah Wa Az-Zifāt Wa Haqūqu az-Zawjain*, terjemah Abu Ahmed Al-Wakidy, Judul *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, t. tp., Pustaka Mantiq, 1992

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. VII; Jakarta: Gunung Agung, 1984

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1979

Yuwonu, Trisno, dan Pius Abdullah, *Kamus Hukum Praktis*, Cet. I; Surabaya: Arkola, 1994

Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin, *Mu'jām Maqāyis al-Lughah*, Juz III, Cet.II; Mesir: Maktab al-Babiy al-Halabi wa Awladuh, 1971

-----, *al-Islām wa al- Hukm Bilādīy*, t.c. Mesir: Dar al-Fikr, 1978

al-Zamakhshariy, Abu Qasim Jar Allah Mahmud bin ‘Umar, *al-Kasysyāf ‘an Haqāiq al-Tanzīl wa Uyūn al-Aqawil al-Ta’wil*, Juz I, Cet.I; Mesir: Dar al-Fikr, 1977